

**PEMBERDAYAAN PETANI SALAK DI KALURAHAN PURWOBINANGUN,
KAPANEWON PAKEM, KABUPATEN SLEMAN
DALAM PERSPEKTIF GOVERNANCE**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

SENDY ELVYNA INSANI

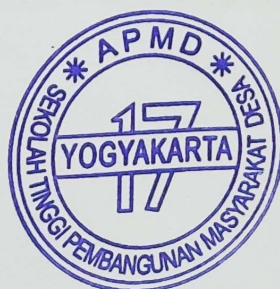
18520117

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S-1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2024



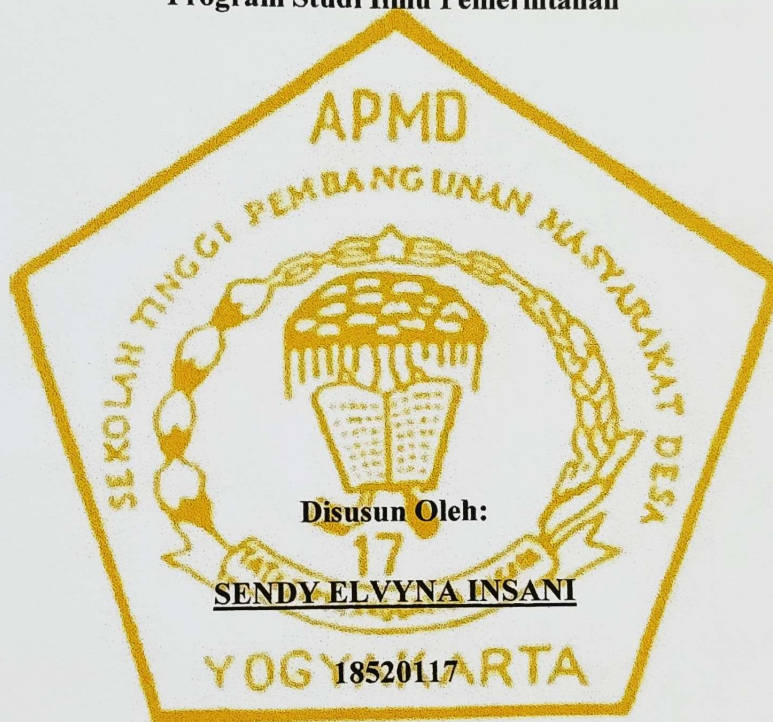
**PEMBERDAYAAN PETANI SALAK DI KALURAHAN PURWOBINANGUN,
KAPANEWON PAKEM, KABUPATEN SLEMAN
DALAM PERSPEKTIF GOVERNANCE**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA




2024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

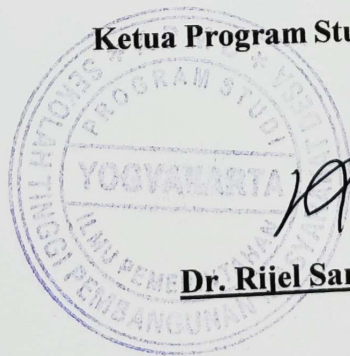
Hari : Kamis
Tanggal : 21 Desember 2023
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

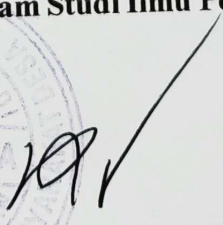
TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
<u>Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si</u> Ketua Penguji / Pembimbing	
<u>Utami Sulistiana, S.P., M.P</u> Penguji Samping I	
<u>Analius Giawa, S.IP., M.Si</u> Penguji Samping II	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan




Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sendy Elvyna Insani
Nim : 18520117
Progam Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PEMBERDAYAAN PETANI SALAK DI KALURAHAN PURWOBINANGUN, KAPANEWON PAKEM, KABUPATEN SLEMAN DALAM PERSPEKTIF GOVERNANCE**” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Sendy Elvyna Insani
18520117

MOTTO

“Pendapat Orang Lain Itu Penting Untuk Evaluasi Diri, Akan Tetapi Jangan Sampai
Mempengaruhi Kepercayaan Diri”

(Sendy Elvyna Insani)

“Karena Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan. Sesungguhnya Sesudah
Kesulitan Itu Ada Kemudahan.”

(QS Al-Insyira: 5-6)

“Hai Orang-Orang Beriman, Mintalah Pertolongan Kepada Allah Dengan Sabar Dan Sholat.
Sesungguhnya Allah Beserta Orang-Orang Yang Sabar”

(QS Al-Baqarah: 158)

“Sesungguhnya Allah Tidak Akan Merubah Suatu Kaum Sehingga Mereka Mengubah Keadaan
Yang Ada Pada Diri Mereka Sendiri”

(QS Ar-Ra'd: 11)

“Allah Tidak Akan Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan Kadar Kesanggupannya”

(QS Al-Baqarah: 286)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai dengan lancar. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bahagia saya persembahkan rasa terimakasih saya kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya Ibu Sa'adah Muslimah dan Bapak Sudarwanto, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya dan keberhasilan dalam penulisan skripsi ini, ucapan terimakasih saya tak akan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tuaku maka skripsi ini karya tulis sederhana yang kupersembahkan untuk kalian.
2. Kepada Adik saya yaitu Radit Ezy Saputra, yang selalu memberikan dukungan dan doa karena kita berdua yang akan meneruskan dan membahagiakan keluarga.
3. Kepada Dosen Pembimbing saya yaitu Ibu Hari Saptaning Tyas, M.Si , terima kasih karena sudah menjadi pembimbing yang bersahabat dan selalu sabar dalam membimbing saya dalam menyusun skripsi. Terima kasih atas kesan baik yang selalu Ibu berikan, semoga kiranya Ibu sehat selalu dan semoga Tuhan membalas kebaikan Ibu.
4. Kepada Lurah Kalurahan Purwobinangun beserta segenap Pamong Kalurahan Purwobinangun dan Petani Salak Purwobinangun yang telah bersedia menerima kehadiran saya sekaligus membantu proses penyusunan skripsi ini.

5. Kepada teman-teman dan sahabat perkuliahan yang selalu bersama berjuang di perantauan ini, saya mengucapkan terima kasih banyak karena selalu ada dalam suka dan duka, yaitu Nesia Nersi, Naomber Prapasini, Lidya bellayanda. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Eky, Rei yang selalu bersedia ketika dimintai pertolongan di perantauan ini.
6. Kepada orang yang selalu mensupport dan selalu mengingatkan saya untuk cepat menyelesaikan pembuatan skripsi ini Aziz Akbar PPN.
7. Untuk kampus STPMD “APMD” Yogyakarta dan KOMAP yang telah menjadi tempat saya berproses, belajar, menambah ilmu dan pengalam-pengalaman yang berharga.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pemberdayaan Petani Salak Di Kalurahan Purwobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Governance”** ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan doa, bimbingan maupun saran yang berguna dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti bukan hanya menyelesaikan sendiri, dengan segenap kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang menjalankan civitas akademika STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Ibu Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si selaku Dosen Pembimbing tercinta, yang telah mengarahkan dan memberikan banyak saran kepada peneliti dengan penuh kesabaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membekali banyak pengetahuan selama menempuh pendidikan di STPMD “APMD” Yogyakarta.
5. Pemerintah dan Masyarakat di Kalurahan Purwobinangun yang telah memberikan ruang, tempat dan waktu serta menjadi teman diskusi selama peneliti melaksanakan penelitian.
6. Orang tua, sahabat dan teman-teman semua yang telah memberikan dukungan, dorongan serta motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman peneliti di masa mendatang.

Yogyakarta, 02 Februari 2024

Penulis,

Sendy Elvyna Insani

INTISARI

PEMBERDAYAAN PETANI SALAK DI KALURAHAN PURWOBINANGUN, KAPANEWON PAKEM, KABUPATEN SLEMAN DALAM PERSPEKTIF GOVERNANCE

Di Kalurahan Purwobinangun, buah salak merupakan produk pertanian yang berkualitas tinggi. Petani di daerah ini memiliki panen salak yang sangat melimpah setiap tahunnya. Buah yang melimpah tidak bisa langsung dirasakan oleh petani, rendahnya nilai jual ke pedagang pada saat musim panen merupakan hal yang pasti dialami oleh petani, banyak petani yang lebih memilih untuk fokus merawat tanaman lain dari pada tanaman salak dan hal ini menjadi salah satu alasan mengapa menurunnya petani produksi salak. Dalam hal ini seharusnya peran pemerintah dibutuhkan dalam mengatur dan mengurus kebijakan yang akan diambil untuk membantu permasalahan para petani salak tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Relasi Pemerintah Kalurahan dengan Petani Salak, dan Masyarakat dalam pemberdayaan petani salak dan untuk mendeskripsikan Interaksi Pemerintah Kalurahan dengan Petani Salak, dan Masyarakat dalam pemberdayaan petani salak. Dengan rumusan masalah Bagaimana Pemberdayaan petani salak dilakukan dalam Perspektif Governance di Kalurahan Purwobinangun, dan Bagaimana kendala-kendala dalam pemberdayaan petani salak dalam Perspektif Governance.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu Kamitua, Perangkat Kalurahan, Dukuh, PPL UPT BP4 (Unit Pelaksana Tugas Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan Dan Perikanan), BPKAL Pokja Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Ketua Kelompok Tani dan beberapa anggota Kelompok Tani, serta Kelompok Tani Wanita Pelaku Usaha UMKM. Penelitian berlokasi di Kalurahan Purwobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk teknis dalam menganalisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil dari penelitian tentang Pemberdayaan Petani Salak di Kalurahan Purwobinangun Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman dalam Perspektif Governance mengungkap bahwa Pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan petani salak belum terlihat, Pemerintah Kalurahan hanya melihat pemberdayaan petani secara umum saja, sedangkan disini pemberdayaan tersebut tidak merata, seharusnya para petani salak diperhatikan secara khusus dalam pengembangannya, karena untuk saat ini para petani salak memiliki permasalahan besar dalam penyaluran dan pemasaran hasil produksi, dalam hal ini para petani salak membutuhkan peran Pemerintah Kalurahan melalui Otoritas dan Kebijakan dalam mencari solusi dari permasalahan mereka. Pemerintah Kalurahan hanya melakukan pemberdayaan petani salak dalam meningkatkan produktivitas namun tidak dengan pendapatannya. Sehingga saat ini pemberdayaan petani salak belum dilakukan secara maksimal.

Kata kunci : Pemberdayaan, Petani Salak, Perspektif Governance

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
INTISARI	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	3
C. FOKUS PENELITIAN.....	3
D. TUJUAN PENELITIAN	4
E. MANFAAT PENELITIAN	4
a. Manfaat Akademis	4
b. Manfaat Teoritis	4
F. LITERATUR REVIEW	5
G. KERANGKA KONSEPTUAL	15
a. Governance.....	15
b. Konsep Pemberdayaan	18
c. Petani.....	23
H. METODE PENELITIAN.....	26
a. Jenis Penelitian.....	26
b. Unit Analisis.....	26
c. Teknik Pengumpulan Data	28
d. Sumber Data.....	29

e. Teknik Analisis Data	29
BAB II DESKRIPSI KALURAHAN PURWOBINANGUN DAN PROFIL PETANI	31
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	31
B. Visi Misi Lurah	32
A. Profil Kalurahan.....	33
a. Gambaran Demografi.....	33
b. Keadaan Sosial	34
c. Aktivitas Ekonomi.....	36
d. Kelompok Tani.....	37
B. Kebijakan Pendapatan.....	38
a. Pendapatan Asli Kalurahan	38
b. Pendapatan Transfer	40
3. Pendapat Lain-Lain.....	41
C. Kebijakan Belanja.....	42
D. Kebijakan Pembiayaan.....	45
E. Pemerintah Kalurahan.....	46
F. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan RPJM Kalurahan	48
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Relasi Pemerintah Kalurahan Dengan Petani Salak dan Masyarakat Dalam Pemberdayaan Petani Salak.	50
B. Interaksi Pemerintah Kalurahan Petani Salak dan Masyarakat Dalam Pemberdayaan Petani Salak	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. KESIMPULAN	60
B. SARAN	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Informan.....	27
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Akhir Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Jumlah Kepala Keluarga.....	33
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Akhir Tahun 2023 Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Dalam KK.....	34
Tabel 2.3 Besaran Target dan Realisasi Pendapatan Asli Kalurahan Kalurahan Purwobinangun Tahun 2015-2022	38
Tabel 2.4 Besaran Dana Tranfer Yang Diterima Kalurahan Purwobinangun Tahun 2018-2022.	41
Tabel 2.5 Perbandingan Realisasi Belanja Per Bidang Kewenangan Kalurahan Purwobinangun Tahun 2018-2022	43
Tabel 2.6 Penjelasan Visi.....	66
Tabel 2.7 Penjelasan Misi	68
Tabel 2.8 Kelompok Tani Wringin Mulyo	70
Tabel 2.9 Kelompok Tani Mekar Lestari.....	71
Tabel 2.10 Kelompok Tani Kumpul Makmur	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pemberdayaan masyarakat adalah program yang berkelanjutan yang berarti menciptakan keadaan masyarakat yang memiliki kekuatan dan peluang untuk meningkatkan kehidupannya sendiri. Peran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat jelas penting dalam penguatan masyarakat. Dengan statusnya sebagai negara agraris, sektor pertanian memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, termasuk berkontribusi pada pembentukan PDB, penyediaan makanan dan bahan pangan, penyediaan sumber devisa, penyediaan bahan pokok industri, penyediaan lapangan pekerjaan, pengurangan kemiskinan, dan ekonomi kerakyatan. posisi bioenergi (Kementan, 2015), sehingga pemerintah harus memprioritaskan sektor pertanian.

Menurut Sumodiningrat (2000), pemberdayaan masyarakat yang menunjukkan kemandirian dapat dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat. Ini dapat dicapai melalui partisipasi aktif masyarakat dan peluang yang diberikan oleh aktor pemberdayaan. Target utama pemberdayaan masyarakat adalah kelompok rentan yang tidak memiliki kecakapan untuk mengakses sumber daya produktif, atau masyarakat yang tersisihkan dalam pembangunan. hasil akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah memberdayakan anggota masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Purwobinangun adalah Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkenal dengan produk pertaniannya. Pertanian memainkan peran penting dalam

perekonomian Kalurahan dan memiliki kontribusi terbesar terhadap Pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten Sleman. Hasil pertanian, terutama salak dan produk pertanian lainnya, sangat menguntungkan di wilayah ini, dan salak Purwobinangun telah diekspor ke negara lain.

Produksi salak pada tahun 2022 sebanyak 21.287,61 ton, jauh lebih rendah dari tahun 2021, menurut data dari Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman. Buah salak adalah produk pertanian unggulan di Kalurahan Purwobinangun sendiri. Petani salak di wilayah ini menghasilkan banyak salak setiap tahun, dengan rata-rata menghasilkan minimal lima karung salak per panen. Petani tidak merasakan langsung hasil melimpah tersebut; banyak dari mereka beralih mengurus tanaman lain daripada tanaman salak, yang menyebabkan penurunan produksi. Selain itu, nilai jual petani rendah selama musim panen.

Dalam hal ini lah seharusnya peran pemerintah dibutuhkan dalam mengatur dan mengurus kebijakan yang akan diambil untuk membantu permasalahan para petani salak tersebut. Namun realitanya kebijakan yang diambil pemerintah Kalurahan tidak sejalan dengan permasalahan dan kebutuhan yang ada pada petani. Pemerintah hanya menjalankan program secara umum saja tanpa bertanya langsung terkait keluhan dan permasalahan yang ada. Hal tersebut sangat bertentangan dengan konsep Good Governance yang salah satunya memiliki karakteristik *Participation* dimana Peranan masyarakat dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui badan perwakilan yang dapat menjaring aspirasinya. Peranan tersebut dibentuk atas dasar kebebasan berhubungan dan berpendapat serta berpartisipasi secara konstruktif. Sehingga Perspektif perencanaan dan pemberdayaan

masyarakat yang sentralistik harus diubah kearah keterlibatan partisipasi masyarakat lokal secara optimal, supaya program yang dirancang pemerintah Kalurahan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan dari para petani salak tersebut. Pengetahuan akan potensi yang dimiliki oleh petani dalam hal ini pemerintah setempat bertanggung jawab untuk memberdayakan para petani. Berdasarkan apa yang telah dijabarkan di atas tentang bagaimana pemberdayaan petani salak di kalurahan Purwobinangun, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam studi penelitian yang berjudul: “Pemberdayaan Petani Salak Di Kalurahan Purwobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Governance”

B. RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana pemberdayaan petani salak dilakukan dalam Perspektif Governance di Kalurahan Purwobinangun?
- b. Bagaimana kendala-kendala dalam pemberdayaan petani salak dalam Perspektif Governance?

C. FOKUS PENELITIAN

- a. Relasi Pemerintah Kalurahan dengan Petani Salak, dan Masyarakat dalam pemberdayaan petani salak.
- b. Interaksi Pemerintah Kalurahan dengan Petani Salak, dan Masyarakat dalam pemberdayaan petani salak.

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan Relasi Pemerintah Kalurahan dengan Petani Salak, dan Masyarakat dalam pemberdayaan petani salak.
- b. Untuk mendeskripsikan Interaksi Pemerintah Kalurahan dengan Petani Salak, dan Masyarakat dalam pemberdayaan petani salak.

E. MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Akademis

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemerintahan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang mengenai pemberdayaan petani salak yang dilakukan dalam Perspektif Governance di Kalurahan Purwobinangun, Kapanewon Pakem, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Sebagai bahan perbandingan dengan penelitian-penelitian lain yang menyangkut strategi kebijakan pemerintah dalam resolusi pemberdayaan petani salak dilakukan dalam Perspektif Governance di Kalurahan Purwobinangun, Kapanewon Pakem, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Manfaat Teoritis

1. Sebagai salah satu sumber referensi bagi pihak yang ingin mengetahui tentang pemberdayaan petani salak dalam Perspektif Governance di Kalurahan Purwobinangun, Kapanewon Pakem, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sebagai masukan bagi pemerintah dalam menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Purwobinangun, Kapanewon Pakem, Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. LITERATUR REVIEW

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di Kapanewon Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan (Ejournal.Ymbz.Or.Id Vol 1, No 3, 2018)

Menurut artikel tersebut, pemberdayaan petani yang dilakukan di daerah belum semuanya mengamati kemampuan SDA dan SDM petani yang dimiliki. Untuk meningkatkan SDM petani, pemerintah daerah harus memungkinkan petani untuk berpartisipasi secara aktif sejak awal, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil yang telah dicapai. Akibatnya, Dinas Pertanian kabupaten Gowa akhirnya akan mengubah konsep pemberdayaan petani menjadi Proses perencanaan pelaksanaan suatu kegiatan dimulai dengan musyawarah yang melibatkan semua pihak dan bertanggung jawab untuk melakukan survei, identifikasi, dan investigasi untuk menetapkan tujuan dan kebijakan kegiatan, Implementasi. Dari artikel diatas sejalan dengan permasalahan dalam penelitian saya, dimana dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah belum melibatkan masyarakat secara penuh sehingga kegiatan atau program yang dibuat oleh pemerintah tidak tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani (Studi Kasus Di Desa Siawung Kapanewon Barru Kabupaten Barru) (Meraja Journal Vol 2, No 1, 2019)

Dalam artikel tersebut menyebutkan penguatan kelompok tani merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan memungkinkan masyarakat tani menjadi lebih mandiri dan Sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan strategi untuk meningkatkan

produktivitas petani. dalam hal ini Pemerintah Desa sangat berperan untuk melihat dan menyusun strategi yang tepat untuk pemberdayaan petani didesanya. Pemerintah desa Siawung telah menerapkan strategi pemberdayaan kelompok tani yang baik sehingga petani merasakan manfaatnya, namun pada bagian yang signifikan strategi tersebut gagal menjawab semua kebutuhan dan kepentingan kelompok tani yang sedang berkembang, sesuai dengan pelaksanaannya. itu tidak begitu baik sebagaimana mestinya. karena terbatas pendanaan dan sarana dan prasarana pendukung. Namun, telah dilakukan upaya untuk meningkatkan strategi pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan dana desa. Dari artikel ini saya dapat melihat bagaimana pemerintah menyusun strategi dan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk pemberdayaan kelompok tani karena hal ini sejalan dengan penelitian saya yang berjudul “Potensi Pemberdayaan Petani Salak”

Pemberdayaan Masyarakat Petani Dalam Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Pedesaan Di Desa Tumani Kapanewon Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. (Jurnal Governance Vol 5, No 1, 2013)

Potensi sumber daya alam didesa Tumani akan diarahkan untuk pengembangan pertanian. Akan tetapi, hasil pertanian terkhusus produksi hasil tani seperti padi sawah tidak terlalu berdampak dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat petani. Upaya penguatan masyarakat tani selama ini belum cukup memberikan manfaat, seperti dalam meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat tani. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat petani secara intensif, diharapkan dapat meningkatkan kualitas masyarakat petani dalam berusaha. Strategi pemerintah untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian. Tentunya harapannya adalah peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian,

yang akan mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor lain seperti industri dan jasa. Upaya peningkatan hasil pertanian dipengaruhi oleh beberapa faktor. Modal merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi berhasilnya usaha peningkatan hasil pertanian. Hal ini karena kelangkaan modal mempengaruhi tingkat produktivitas pertanian. 3). Faktor pasar, pasar merupakan faktor terakhir dalam pengembangan usaha pertanian, dikarenakan jika pasar tidak tersedia maka hasil produksi petani tidak akan menguntungkan, dan meningkatkan pendapatan dan kekayaan keluarga petani. Oleh karena itu, pasar sangat menentukan kelangsungan pertanian. 4). Faktor kelembagaan masyarakat petani, kelembagaan masyarakat pedesaan di Indonesia telah tumbuh dan berkembang sejak dahulu kala, dan fungsi utamanya adalah kelembagaan gotong royong (kerjasama), khususnya dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada pada masyarakat bersangkutan. 5). Faktor Pendidikan Petani, sektor pertanian Indonesia dibatasi oleh rendahnya tingkat pendidikan petani yang sebagian besar berpendidikan lulusan sekolah dasar, sehingga tidak mengherankan jika produksi pertanian tidak terlalu kompetitif. Karena tingkat pendidikan petani yang rendah dapat mempengaruhi rendahnya produktivitas dan etos kerja petani, petani Indonesia sebagian besar adalah petani subsistem tradisional. Berdasarkan artikel diatas saya dapat melihat potensi seperti apa yang dapat dikembangkan pemerintah untuk pemberdayaan petani salak yang ada di kalurahan purwobinangun.

Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Untuk Meningkatkan Hasil Panen Padi (jurnal.darmaagung, Vol 4, No 1, 2019)

Peranan pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat petani untuk meningkatkan hasil padi menjelaskan bahwa pemerintah bekerja sama dengan jasa

pertanian dan pelayaran untuk menyediakan jasa pertanian seperti penyediaan bajak (Jetor), mesin pompa air, pupuk dan benih bersubsidi, mesin Perontok Padi. Hambatan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat bagi petani yaitu kurangnya lahan pertanian bagi petani, masalah kepemilikan tanah dan masalah pengairan. Faktor-faktor tersebut menghambat faktor pemberdayaan masyarakat tani di Desa Mabar Hilir Kapanewon Medan Del. Peran pemerintah provinsi dalam pemberdayaan masyarakat petani harus tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dalam bentuk kebijakan agar masyarakat tidak terbebani dengan pelaksanaan program-program pemerintah provinsi khususnya Program Kelompok Tani. Dari artikel ini dapat menjadi referensi bagaimana strategi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani.

Penguatan Kelembagaan Petani Menuju Kesejahteraan Petani (Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial, Vol Ix, No17, 2017)

Artikel ini menjelaskan masalah terbesar yang dialami petani dan tindakan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Masalah utama yang dihadapi petani adalah lemahnya daya penawaran mereka. Petani memproduksi pertanian dengan lahan yang terbatas dan tanpa pengetahuan yang memadai tentang masalah manajemen produksi. Selain itu, karena informasi pasar yang terbatas, petani berada dalam posisi yang tidak memiliki daya ketika harus menetapkan harga hasil produksi mereka. Daya tawar petani dapat ditingkatkan dengan menguatkan kelembagaan pertanian. Dengan lembaga ini, petani bersama-sama merancang proses produksi dan pemasaran untuk mencapai efisiensi biaya dan memperkuat penawaran petani dalam sistem pertanian. Upaya memperkuat kelembagaan petani perlu adanya dukungan semua pihak karena hal

ini merupakan salah satu amanat UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani No. 19 tahun 2013.

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kakao Di Desa Kayuangan Kapanewon Malunda Kabupaten Majene (Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol Iv, No 14, 2014)

Permasalahan utama dalam pemberdayaan petani di Desa Kayuangi adalah minimnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kurangnya kepemimpinan dan pengawasan UPTD pertanian kabupaten Malunda, program pelatihan tidak mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara penjualan kakao fermentasi untuk meningkatkan penjualan. Sehingga disini peran pemerintah daerah dipertanyakan, ternyata berdasarkan hasil penelitian hal tersebut dikarenakan Mentalitas masyarakat yang masih relatif rendah, mengingat tingkat pendidikan hanya sebatas sekolah menengah (SMP), kondisi geografis belum memadai untuk distribusi logistik pertanian, sehingga masih menjadi kendala utama saat ini. Tim penyuluh yang belum memadai, sehingga tim penyuluh yang sama juga aktif di lebih dari satu desa dalam waktu yang bersamaan. Hal inilah yang menyebabkan penyuluhan tidak berjalan maksimal. Dari artikel diatas kita dapat melihat bahwa kolaborasi antar stakeholder sangat dibutuhkan untuk meyelesaikan suatu permasalahan. berdasarkan artikel ini saya ingin mengetahui sejauh mana kerjasama antar stakeholder yang ada di Kalurahan Purwobinangun dalam pemberdayaan petani salak.

Pemberdayaan Petani Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan (Studi Di Desa Betet, Kapanewon Ngronggot, Kabupaten Nganjuk) (Jurnal Administrasi Publik, Vol 2, No 1, 2014)

Kabupaten Nganjuk adalah salah satu lumbung padi yang masih memiliki banyak lahan pertanian sehingga sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Namun demikian, kesejahteraan para petani di sini masih belum diakui. Ini karena modal pengerjaan yang keluar tidak sebanding dengan harga jual hasil panen yang diterima. Selain itu, diyakini bahwa petani kekurangan pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk memiliki kekuatan untuk mengembangkan pertaniannya dengan memberdayakan sesuai dengan otonomi daerah. Salah satu wilayah yang dilaksanakan Pemberdayaan Petani adalah Desa Betet di Kapanewon Ngroggot. Pemberdayaan terjadi di sini melalui konseling. Saran diberikan dengan memberikan informasi PPL (Penyuluhan Pertanian Lapangan) tentang teknologi baru dan cara budidaya kepada kelompok tani atau kelompok tani (Gapoktan). Tujuan dari konsultasi adalah untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan petani untuk berpartisipasi dalam pertanian sehingga mereka dapat mencapai hasil yang lebih banyak, lebih baik, dan lebih beragam yang dapat membantu mencapai ketahanan pangan. Di Desa Betet, pemberdayaan petani berhasil mencapai ketahanan pangan. Di mana produksi semakin baik dan meningkat sebagai hasil dari peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani. Keberhasilan tingkat ketahanan pangan di desa Betet sangat didukung oleh pelaksanaan program dengan dukungan penuh pemerintah daerah, berupa bantuan subsidi dan benih. Sumber daya manusia yang tidak mencukupi dan ketersediaan alat pertanian yang terbatas menjadi sumber hambatan. Untuk meningkatkan ketahanan pangan, petani, masyarakat, dan pemerintah harus bekerja sama untuk mendukung program pemberdayaan petani. Berdasarkan artikel ini dapat menjadi referensi saya tentang

kerjasama antara pemerintah daerah, petani, dan masyarakat terhadap keberhasilan pemberdayaan petani.

Fenomena Penuaan Petani Dan Berkurangnya Tenaga Kerja Muda Serta Implikasinya Bagi Kebijakan Pembangunan Pertanian (Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol 34, No 1, 2016)

Keberhasilan pembangunan pertanian berkelanjutan bergantung pada keberadaan kelompok petani berkualitas tinggi yang berkomitmen untuk mengembangkan pertanian. Namun demikian, ada masalah yang sangat penting dalam pembangunan pertanian: jumlah petani muda berkurang baik secara absolut maupun relatif, Sedangkan jumlah petani tua meningkat. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan penurunan minat pekerja muda dalam sektor pertanian adalah sebagai berikut: persepsi sektor pertanian dipandang rendah dan memiliki resiko tinggi untuk tidak menjamin tingkat pendapatan, stabilitas, dan kontinuitas; kepemilikan tanah rata-rata yang rendah; pengelolaan pertanian yang buruk di desa yang tertinggal atau terbelakang; tidak ada kebijakan yang memberikan insentif khusus kepada petani muda atau pemula; dan perspektif yang berubah dari perspektif anak muda. Untuk menarik generasi muda untuk bekerja di bidang pertanian, mereka harus mengubah keyakinan mereka bahwa pertanian adalah bidang yang menarik dan menjanjikan jika dikelola dengan hati-hati; pengembangan agribisnis, inovasi teknologi, insentif khusus untuk petani muda; pengembangan pertanian modern, pendidikan dan keterampilan petani muda; dan memberi mereka pengenalan awal tentang pertanian. Dari artikel diatas dapat kita ketahui bahwa keterlibatan generasi muda sangat berpengaruh disektor pertanian hal ini dikarenakan

untuk perkembangan pertanian menjadi lebih maju dengan adanya inovasi inovasi baru yang diciptakan generasi muda.

Politik Pemberdayaan Petani Di Desa Rambah Muda, Riau (Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2, 2017)

Mengorganisir petani dengan menggunakan sistem integrasi sapi-kelapa (Siska) di desa Rambah Muda untuk mengidentifikasi masalah terkait cara kelembagaan petani kecil untuk penyelesaian konflik kelapa sawit. Strategi penguatan kelembagaan petani sawit kecil pada masa reformasi tidak mempertimbangkan kepentingan petani. Perubahan struktural melibatkan banyak peran dengan berbagai landasan sosial dan kepentingan yang tumpang tindih. Memungkinkan petani untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi petani yang lebih terintegrasi adalah fokus utama strategi. Saat ini, masalah politik lokal belum dibahas dalam penelitian pemberdayaan petani. Teori-teori "politik kelompok" dan "politik lokal" memperkuat konsep yang dikemukakan kaum pluralis pada uraian sebelumnya dan dapat digunakan untuk membangun kerangka teoritis untuk pemberdayaan petani kecil mandiri, seperti model Siska di Riau. Di desa Rambah Muda, strategi pemberdayaan petani dimulai dengan menciptakan struktur lembaga yang mendukung petani, seperti peraturan pemerintah yang dapat menyatukan kelembagaan dan memastikan proses politik serta pembiayaan program pemberdayaan. Tiga hal adalah tujuan program ini: peraturan lokal, kelembagaan sosial petani, dan pembangunan sumber daya petani yang berkelanjutan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membangun kerjasama antar aktor dalam desentralisasi kekuasaan dengan memberikan akses kepada petani untuk pengambilan keputusan di tingkat lokal. Berdasarkan artikel ini dapat kita lihat bagaimana pemetaan kekuasaan

antara pemerintah, lembaga terkait, dan petani dalam pemberdayaan petani dengan mengedepankan politik lokal.

Strategi Pengembangan Salak Pondoh Pronojiwo Kabupaten Lumajang (Jurnal Ilmiah Inovasi, Vol 13, No 3, 2013)

Salak Pronojiwo Kabupaten Lumajang adalah salah satu produsen salak terbaik di daerah tersebut. Oleh karena itu, pengembangan salak pondoh Pronojiwo akan membantu program Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang untuk meningkatkan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis, dan peningkatan kesejahteraan petani. Perkembangan produktivitas salak pondoh di Kapanewon Pronojiwo Kabupaten Lumajang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 21,25%. Penelitian menunjukkan bahwa ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan salak di Kabupaten Lumajang, yaitu, Kekuatan: sumber daya lahan, kelembagaan kelompok pembudidaya, pemasaran produk, lokasi sentra, sumber daya manusia, varietas salak, barang tropika; Kelemahan: produksi, benih, pemupukan berimbang, alat penyimpan buah, pengelolaan kebun, permodalan, area salak, kelangsungan produksi; Peluang: paket teknologi, kebijakan pemerintah. Dengan demikian, cara yang paling tepat untuk mengembangkan produksi salak adalah dengan menggunakan strategi kegiatan agresif, yang berarti memperluas bisnis dengan membangun lebih banyak lokasi dan memperluas jenis produk dan jasa yang ditawarkan. Perluasan usaha dapat dicapai dengan memperluas pemasaran, sarana produksi, dan teknologi melalui pengembangan internal dan eksternal. Oleh karena itu, pembinaan teknis petani harus terus ditingkatkan, terutama dalam hal pelatihan pemagangan, teknik penelitian pertanian, dan paket pengusaha. Selain itu, diperlukan suatu informasi

pemasaran yang diketahui oleh para pelaku sektor pertanian salak, khususnya informasi harga di wilayah tertentu. Selain itu, diperlukan peningkatan keterampilan para pelaku sektor pertanian salak melalui pengembangan keterampilan organisasi dan teknis. Mereka memiliki kemampuan untuk mengembangkan bisnis karena mereka sangat inovatif dan kreatif. Berdasarkan uraian artikel diatas dapat menjadi acuan dalam penelitian saya dimana dalam perkembangan pemberdayaan petani salak kita harus melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terjadi dalam produksi salak, sehingga kita dapat mencari potensi strategi yang dapat dilakukan untuk perkembangan pemberdayaan petani salak.

Berdasarkan uraian-uraian penelitian, jurnal maupun buku yang ada di atas, letak persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat pembahasan tentang pemberdayaan petani yang ada di desa. Sedangkan letak perbedaannya adalah objek penelitiannya. Penelitian kali ini akan lebih fokus membahas tentang pemberdayaan petani salak dalam perspektif Governance yang mana belum pernah ada dibahas sebelumnya di penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini lebih mengkaji tentang bagaimana pemberdayaan petani salak dilakukan dan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah kalurahan dalam pemberdayaan petani salak berdasarkan perspektif Governance. Penelitian ini juga menggunakan perspektif Governance dalam pelaksanaannya. Dimana perspektif governance itu sendiri berbeda sudut pandang dari penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu penelitian pemberdayaan petani salak melihat relasi antara pemerintah dengan pemerintah desa dan para petani salak, serta interaksi pemerintah dan stakeholder yang terkait dalam pemberdayaan petani salak.

G. KERANGKA KONSEPTUAL

a. Governance

Tata pemerintahan adalah ketika wewenang ekonomi, politik, dan administrasi digunakan untuk mengelola urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat menyampaikan kepentingan mereka, memenuhi kewajiban mereka, dan menjembatani perselisihan. (UNDP, 2000)

Sedarmayanti (2003) menyatakan bahwa istilah "*Governance*" mencakup arti pemerintahan sebagai suatu kegiatan serta pengurusan, pengelolaan, pengarahan, dan pembinaan penyelenggaraan. Sedarmayanti (2003) membagi unsur-unsur pemerintahan (pihak berwenang) ke dalam tiga kategori:

1. Negara/Pemerintahan; Gagasan tentang pemerintahan pada dasarnya berkaitan dengan kegiatan negara, tetapi juga melibatkan sektor swasta dan kelembagaan masyarakat (organisasi masyarakat sipil).
2. Sektor Swasta; Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif terlibat dalam sistem pasar, seperti industri pengolahan (manufaktur), perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.
3. Masyarakat (*Civil Society*); Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Spedley dan McCurdy dalam Astuti (2012) menyatakan, pola relasi sosial atau hubungan sosial yang terbentuk antara dua orang atau lebih dalam jangka waktu yang relatif lama akan membentuk suatu pola. Pola ini disebut sebagai pola relasi sosial.

Pengusaha, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah terlibat dalam pemberdayaan masyarakat. Sumarto (2003) mengartikan governance sebagai mekanisme, praktik dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Kualitas governance dinilai dari kualitas interaksi yang terjadi antara komponen governance yaitu pemerintah, *Civil Society* dan sektor swasta. Peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain (sebagai fasilitator) untuk masyarakat dan sektor swasta. Masyarakat berpartisipasi dan swasta ikut aktif dalam upaya penyelenggara dan penyedia jasa membantu pemerintah. Pemerintah, Perusahaan swasta, dan Rakyat adalah aktor dalam menjalankan pemerintahan. Mereka berada di tempat yang sama, memiliki persamaan, keterikatan, dan peran yang seimbang, dan saling mengawasi. Dalam konsep pemerintahan, pelakunya tunggal atau terkonsentrasi hanya pada birokrasi pemerintahan yang mendominasi berbagai peran dan fungsi.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa, bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat yang membentuk pola relasi sosial antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Serta interaksi keterkaitan aktor tersebut dalam membangun pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,

Kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul desa yang ada, yang belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelenggaraan bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Penyelenggaraan desa diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Desa, Penetapan Susunan Organisasi Pembentukan Calon dan Pemilihan Desa, Penetapan Tata Tertib Desa, Pembentukan dan Penetapan Lembaga Kemasyarakatan, menentukan urutan, dan pembentukan dewan desa. Mengangkat, memilih dan memutuskan perwakilan desa, menyusun dan memutuskan anggaran dan pendapatan belanja desa, melaksanakan dan memelihara kelembagaan adat, menetapkan peraturan desa, memutuskan kerjasama antar desa, menetapkan dan memutuskan pinjaman desa, membentuk badan usaha milik desa, menerbitkan izin skala desa, menentukan wilayah khusus desa, memastikan keamanan dan ketentraman masyarakat, mengelola tugas administrasi bersama, mengelola pendanaan distribusi pendapatan, menyeimbangkan pendanaan pusat dan daerah ke kota-kota.

Berdasarkan uraian tersebut, semakin jelas bahwa desa mempunyai kekuasaan yang didasarkan pada hak asal usul desa, dan juga urusan pemerintahan atau pemerintahan kota yang dialihkan ke desa, Badan ini bertugas membantu, Pemerintah Kapanewon, Pemerintah Kabupaten atau Kota dan administrasinya hal-hal lain yang menurut peraturan perundang-undangan semuanya diserahkan kepada desa.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang ketentuan pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014, Tugas pemerintah desa, adalah memajukan kehidupan masyarakat desa, memajukan ekonomi desa, menjamin ketentraman dan ketertiban masyarakat desa,

menyelesaikan perselisihan sosial di desa, mempresentasikan dan bersama-sama menentukan usulan organisasi desa. seperti peraturan desa. Berkolaborasi dengan BPD dan mengirimkan laporan pelaksanaan pemerintahan desa kepada gubernur atau walikota dan juga kepada BPD, melaksanakan kehidupan demokrasi: prinsip-prinsip pelaksanaan pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari persekongkolan, korupsi, dan nepotisme; menjalin hubungan kerja dengan semua mitra kerja pemerintah desa; mematuhi dan menegakkan semua peraturan perundang-undangan; dan menyelenggarakan urusan desa dengan baik, memelihara, merawat, dan mengembangkan infrastruktur desa.

Berdasarkan uraian di atas, pemerintah desa yang berkuasa adalah mengurus dan mengatur tata usaha perangkat desa dan tata usaha badan perangkat desa memerintah secara mandiri atas nama kemandirian desa dan kepentingan masyarakat desa.

b. Konsep Pemberdayaan

1. Indikator pemberdayaan

Mengetahui tujuan dan fokus pemberdayaan secara operasional, seseorang harus memahami berbagai indikator keberdayaan. Indikator ini dapat memperlihatkan seberapa kemampuan seseorang. Jadi, ketika sebuah kebijakan pemberdayaan sosial dibuat, semua upaya dapat difokuskan pada sasaran perubahan yang paling efektif. Dalam Edi Suharto, Schurler, Hasemi, dan Riley menciptakan 8 indikator pemberdayaan yang mereka sebut sebagai index pemberdayaan atau *empowerment index* (Suharto, 2004):

- Kebebasan mobilitas: Kapasitas seseorang untuk pergi keluar rumah atau area tempat tinggalnya, seperti ke pasar, bioskop, tempat beribadah, atau ke rumah

tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika seseorang dapat melakukan perjalanan secara individu.

- Kemampuan untuk membeli barang sederhana: Kemampuan seseorang untuk membeli kebutuhan sehari-hari keluarga seperti beras, minyak goreng, bumbu, dan keperluan pribadi seperti sabun, minyak rambut, dan sampo. Mereka dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal ini, terutama jika mereka dapat mengambil keputusan sendiri tanpa perizinan pasangannya, dan mereka juga dapat membeli barang tersebut dengan uang mereka sendiri.
- Kemampuan membeli komoditas besar: Kemampuan seseorang untuk membeli barang sekunder atau tersier, seperti pakaian, TV, dan pakaian keluarga. Sama halnya indikator sebelumnya, poin tertinggi diberikan kepada orang yang dapat mengambil keputusan sendiri tanpa harus meminta izin pasangan mereka, terutama jika mereka membeli barang-barang tersebut dengan uang mereka sendiri.
- Terlibat dalam pengambilan keputusan rumah tangga: Dapat membuat keputusan untuk keluarga secara individu maupun dengan pasangan, seperti mengenai perbaikan rumah, membeli sapi untuk ditenak, atau mendapatkan pinjaman usaha.
- Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: Masyarakat ditanya apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, atau istri, anak-anak, serta mertua) yang mengambil uang, tanah, atau perhiasan tanpa izin darinya; melarang untuk memiliki anak; atau melarang bekerja jauh di luar rumah.

- Kesadaran hukum dan politik: Mengetahui siapa yang bekerja di pemerintahan sebuah desa atau Kalurahan, siapa presiden, dan apa artinya dari memiliki surat nikah dan hukum waris.
- Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: Jika seseorang terlibat dalam kampanye atau melakukan protes dengan orang lain, ia dianggap "berdaya". Contohnya, jika seseorang istri protes dan mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial.
- Jaminan finansial dan keterlibatan terhadap keluarga seperti memiliki rumah, aset produktif, dan tabungan. Jika seseorang memiliki ciri-ciri ini sendiri dan terpisah dari pasangannya, orang tersebut dianggap memiliki poin yang tinggi.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Tindakan pemberdayaan melibatkan peningkatan kekuatan pribadi, antarpribadi, atau politik untuk memungkinkan individu, keluarga, dan komunitas untuk secara aktif mengatasi dan memperbaiki situasi mereka. Hal ini juga dapat dilihat sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan, memberikan mereka kemampuan untuk membuat keputusan dan memberikan pengaruh terhadap lingkungan sekitar mereka. Hal ini termasuk memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk upaya profesional dan sosial mereka., menurut Totok dan Poerwoko (2012).

Menurut Winarni dalam Ambar Teguh (2004), Konsep pemberdayaan masyarakat terdiri dari tiga komponen: pengembangan (memungkinkan), penguatan kemampuan atau kekuatan (*mempowering*), dan penciptaan kemandirian. Pendapat ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ini bukan hanya terjadi kepada masyarakat yang

tidak mempunyai kemampuan; masyarakat yang tidak memiliki keberdayaan juga dapat berkembang hingga tercapai kemandirian. Menurut Chatarina Rusmiyati (2011), Kemampuan pengendalian kehidupan mereka sendiri dengan cara mengarahkan individu, organisasi, dan komunitas disebut pemberdayaan. Pemberdayaan juga dapat disebut sebagai proses menjadikan individu yang cukup kuat untuk terlibat dalam peristiwa dan kelompok yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang membangkitkan individu atau masyarakat dengan cara peningkatan kemampuan masyarakat, mengubah tingkah laku masyarakat, dan memobilisasi masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya atau mandiri, prinsip dasar pemberdayaan adalah sebagai berikut:

1. Penyadaran
2. Pelatihan
3. Pengorganisasian
4. Pengembangan kekuatan
5. Membangun dinamika

Untuk aktor perubahan, ini dilakukan kepada kelompok sasaran pada level *Mikro*(individu, keluarga, dan kelompok kecil), *Mezzo*(organisasi dan komunitas), *Makro*(kota, regional, dan nasional), dan *Global*. Sering disebut sebagai cara memberdayakan (mengubah kelompok sasaran dari keadaan yang tidak berdaya menjadi berdaya) untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Prinsip ini pada intinya mendorong dan membimbing klien untuk memutuskan sendiri apa yang harus

mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah mereka. untuk memastikan bahwa pelanggan memiliki kesadaran penuh dan kuasa penuh untuk menentukan hari depannya. Hasilnya menunjukkan dasar konsep pemberdayaan adalah suatu cara untuk meningkatkan potensi dan kemandirian dari kelompok masyarakat sehingga mereka dapat memaksimalkan kemampuan mereka dan mencapai tujuan hidup yang lebih baik.

Pemberdayaan harus mempertimbangkan siapa pun yang akan menjadi sasarannya. Schumacer dalam Ambar Teguh S, (2004) Menyatakan, sasaran pemberdayaan, adalah kelompok atau masyarakat siapa yang akan diberdayakan, melihat pemberdayaan dari sudut pandang masyarakat miskin tanpa harus menghilangkan kesenjangan struktural terlebih dahulu. Sebenarnya, masyarakat miskin memiliki keberdayaan untuk membangun. Selain itu, Organisasi Non-Pemerintah (NGO) memiliki peranan penting dikarenakan dianggap lebih mandiri, berpengalaman, dan inovatif daripada pemerintah. Konsep pemerintahan yang baik terkait dengan pemberdayaan. Dalam proses pemberdayaan masyarakat, pemerintah, swasta, dan masyarakat berkolaborasi. Suparjan & Hempri S (2003) berpendapat, tiga hal yang harus dilakukan untuk memberdayakan masyarakat adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pemahaman kritis atau kedudukan masyarakat dalam struktur sosial politik Ini berangkat dari gagasan bahwa konstruksi sosial yang ada pada masyarakat itu sendiri adalah sumber kemiskinan.
- Diharapkan kesadaran kritis akan membantu masyarakat lebih menyuarakan pendapat dan membuat keputusan tentang eksploitasi. Perlu diketahui bahwa

sebenarnya kemiskinan bukan hanya masalah kesejahteraan sosial; itu juga terkait dengan aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan.

- Pembangunan sosial budaya masyarakat juga perlu meningkatkan pemberdayaan.

Pemberdayaan Masyarakat lokal dan komunitas

Upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kedudukan kalangan masyarakat lokal yang sekarang tidak mampu membebaskan diri dari keadaan saat ini disebut pemberdayaan masyarakat lokal. Upaya yang diperuntukkan untuk membantu masyarakat lokal dalam perencanaan, memilih, dan mengelola kemampuan yang mereka miliki melalui tindakan kolektif dan *networking* untuk mencapai kapasitas kemandirian ekonomi, ekologi, dan sosial (Alam, 2009).

c. Petani

Siapapun yang tinggal di daerah pedesaan dan melakukan kegiatan pertanian disebut petani. Lahan atau kepemilikan tanah inilah yang membedakan petani dengan masyarakat lainnya. Menurut Wolf (1983), “Petani adalah bagian dari populasi yang benar-benar berpartisipasi dalam proses bercocok tanam dan membuat keputusan pertanian secara mandiri.” Definisi yang diajukan oleh Wolf tampaknya berfokus pada aktivitas mereka yang benar-benar terlibat dalam kegiatan tersebut. budidaya pertanian, Mencakup kegiatan menanam dan menerima hasil, serta pemilik dan penggarap, sepanjang mereka mampu membuat keputusan yang relevan tentang bagaimana tanaman ditanam, tetapi tidak termasuk nelayan dan buruh tani yang tidak memiliki tanah. Petani adalah setiap individu yang tinggal di pedesaan dan mengelola usaha pertanian (Soekanto, 1983). Wolf (1983) membagi petani menjadi dua kategori: yang pertama adalah petani pemilik, yang berarti mereka memiliki lahan dan memberikan kepada orang

lain untuk diolah; dan yang kedua adalah petani penggarap, yang berarti mereka menggarap atau mengerjakan lahan yang dimiliki oleh orang lain.

AT Mosher berpendapat pertanian terbagi menjadi dua kelompok: modern pertanian dan primitif. Pertanian primitif didefinisikan sebagai pertanian yang hanya menggunakan metode yang sudah ada dan tidak menerima inovasi. Pertanian modern didefinisikan sebagai penguasa pertumbuhan tanaman, berinovasi mencari teknik baru, dan dapat menerima pembaruan inovasi. Sebaliknya, mereka yang hanya mengharapkan bantuan alam untuk keberhasilan pengelolaan pertaniannya. Petani jenis ini dapat berkembang untuk mendukung ekonomi dalam pertanian dan bidang lain.

Mosher (1970) membagi petani menjadi tiga kategori:

1. Petani yang mengelola usaha taninya, petani biasa yang mengelola usaha taninya.
2. Petani sebagai jurutani, petani yang melakukan kegiatan bertani dan memiliki kemampuan dari pengalaman bertani.
3. Petani sebagai manusia, petani seperti manusia lainnya, memiliki rasionalitas, harapan, dan keinginan untuk hidup yang lebih baik.

- Usaha Tani

Sumber daya alam lokal yang diperlukan untuk pertanian, seperti tubuh tanah dan air, perbaikan tanah, sinar matahari, bangunan di atas tanah, dan sebagainya, disebut sebagai usaha tani (Mosher, 1970). Bercocok tanam atau memelihara ternak adalah dua contoh usaha tani. Namun, Daniel (2002) berpendapat, usaha tani adalah kegiatan memobilisasi aset dan peristiwa pertanian. Dengan kata lain, itu adalah kegiatan pengelolaan alat produksi pertanian untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan.

Soekartawi (1996) menyatakan bahwa ada tiga jenis pendapatan usaha tani, yaitu:

1. *Gross Farm Income*, (Pendapatan Kotor Usaha Tani), yang dihitung sebagai nilai total produk usaha tani dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak dijual.
2. *Net Farm Income*, (Pendapatan Bersih Usaha Tani), yang dihitung sebagai selisih antara pengeluaran total usaha tani dan pendapatan kotor usaha tani, yang merupakan nilai total produk usaha tani dalam jangka waktu tertentu.
3. *Net Farm Earning*, (Penghasilan Bersih Usaha Tani), diperoleh dengan menggabungkan pendapatan bersih dan bunga modal pinjaman.

Menurut Hermanto (1996), beberapa aspek yang mempengaruhi pendapatan usaha tani adalah sebagai berikut:

1. Luas lahan usaha, yang mencakup luas tanaman, luas pertanaman, dan luas pertanaman rata-rata;
2. Tingkat produksi, yang mencakup jumlah tingkat produksi; dan
3. Pilihan dan gabungan cabang usaha.

H. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif. Dijelaskan oleh Moleong bahwa karakteristik penelitian kualitatif deskriptif merupakan data-data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau narasi dan gambar tentang kondisi Empiris (Moleong, 2018)

Sedangkan, Nazir mengatakan tujuan dari penelitian deskriptif itu adalah untuk mendeskripsikan secara akurat tentang kebenaran, sifat dan hubungan sesama yang diteliti (Nazir, 2005).

Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan menggali lebih dalam fenomena yang ada melalui wawancara, observasi dan pemanfaatan dokumen tentang Pemberdayaan Petani Salak Di Kalurahan Purwobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Governance.

b. Unit Analisis

a) Obyek Penelitian

Objek yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah otoritas Pemerintah Kalurahan terhadap pemberdayaan petani salak berdasarkan perspektif governance di Kalurahan Purwobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman.

b) Subyek Penelitian

Subjek penelitian terdiri dari Pemerintah Kalurahan Purwobinangun dan masyarakat kelompok petani salak. Tokoh-tokoh khusus ini dipilih sebagai informan karena mereka berhubungan dengan objek penelitian dan dapat diandalkan untuk memberikan informasi dan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Adapun tokoh-tokoh yang akan menjadi informan bagi penelitian ini adalah :

1.1 Tabel Informan

NO	NAMA	JABATAN
1	PAK YUDI SUSANTO	KAMITUA Purwobinangun
2	PAK PURWANTO	Perangkat Kalurahan Purwobinangun
3	PAK SIGIT PURNOMO	Dukuh Ngelosari (Kelompok Tani Ngelosari Purwobinangun)
4	PAK BUDIMAN	PPL UPT BP4 Pakem Purwobinangun
5	PAK PARJIONO	Dukuh Kemiri (Ketua Kelompok Tani Kemiri Purwobinangun)
6	PAK AGUS PRIYANKA	Bpkal Pokja Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat
7	IBU RINI HANDAYANI	KWT UMKM Purwobinangun
8	IBU YATMI	Anggota Kelompok Tani Purwobinangun
9	IBU RAMTIANA	KWT UMKM Olahan Salak
10	IBU YULI	Kelompok Tani Ngelosari Purwobinangun

Sumber : Observasi Tokoh-tokoh informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, 2023

c. Teknik Pengumpulan Data

Metode Penelitian Kualitatif memiliki beberapa cara dalam melakukan pengumpulan data. Metode-metode tersebut adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

a) Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah kegiatan pengamatan dan catatan gejala yang tampak pada subjek penelitian secara sistematis. Pada kegiatan kelompok tani di Kalurahan Purwobinangun saya mengamati bahwa pada kegiatan tersebut peran aktif dari perwakilan kalurahan tidak terlihat, dimana pada kegiatan tersebut kalurahan hadir hanya sebatas memenuhi kehadiran secara formal namun keterlibatan secara internal belum ada.

b) Wawancara (*Interview*)

Percakapan yang memiliki tujuan tertentu disebut wawancara. Pada penelitian ini saya melakukan wawancara dengan 10 informan terpilih yang dapat memberikan informasi sesuai dengan permasalahan dalam penelitian saya, yaitu terkait Relasi dan Interaksi Pemerintah Kalurahan dengan petani salak dan masyarakat dalam pemberdayaan petani.

c) Dokumentasi

Salah satu metode untuk mendapatkan data dan informasi, dokumentasi, dokumentatif dari berbagai sumber, termasuk media dan lembaga terkait. Pada penelitian ini terdapat dokumen kalurahan RKP Kalurahan tahun anggaran 2024, RPJM Kalurahan tahun 2021-2026, dan Data Petani Salak Kalurahan Purwobinangun dari UPTD BP4 V Pakem Sleman.

d. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat beberapa sumber data:

a) Data Primer

Adalah data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber yaitu beberapa anggota Kelompok Tani Salak, Pemerintah Kalurahan, serta beberapa Masyarakat yang berprofesi sebagai petani salak di Kalurahan Purwobinangun.

b) Data Sekunder

Adalah data tentang Petani Salak di Kalurahan Purwobinangun dapat diperoleh dari Laporan, dokumentasi, Kantor Kapanewon, atau instansi terkait lainnya.

e. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses menganalisis dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga tema dapat ditemukan dan dirumuskan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh analisis data. Proses analisis ini disesuaikan dengan jenis dan karakteristik data yang telah dipilih untuk penelitian. Menurut Miles and Huberman (1984), sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2015), analisis data kualitatif dilakukan secara konsisten dan interaktif, memberikan gambaran tentang fenomena lapangan (Moleong). Proses analisis data meliputi:

a) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti menyatukan, mengidentifikasi tema dan pola, memprioritaskan yang penting, dan membuang yang tidak diperlukan. Setiap penelitian akan dikendalikan oleh tujuan yang akan tercapai saat data direduksi. Dalam penelitian kualitatif, tujuan utama peneliti adalah untuk menemukan apa yang dinilai

asing, tidak diketahui, atau tidak berpola. Jika ini terjadi, peneliti harus memperhatikan hal-hal ini saat mereka melakukan reduksi data.

b) *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dapat dipresentasikan dalam bentuk bagan, uraian singkat, flowchart, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif, data biasanya disajikan dengan teks naratif. Ini juga dapat berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja), dan chart. Dengan menampilkan data, akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c) *Conclusion Drawing/Verification*

Kesimpulan awal hanyalah sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika ada bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan awal menjadi kredibel.

BAB II

DESKRIPSI KALURAHAN PURWOBINANGUN DAN PROFIL PETANI

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Kalurahan Purwobinangun terletak disebelah utara kota Yogyakarta dengan jarak 17 km dari kota Yogyakarta, sementara jarak Kalurahan Purwobinangun ke Kabupaten Sleman kira-kira 8 km. Kalurahan Purwobinangun dengan wilayah-wilayah yang ada disekitarnya yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan hutan lindung merapi.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Hargobinangun, Kalurahan Candi Binangun.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Donokerto. Kalurahan Kerto.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Donoharjo.

Jika dilihat dari ketinggian tanah, tanah di Kalurahan Purwobinangun merupakan dataran tinggi ini disebabkan karena Kalurahan Purwobinangun berada dalam ketinggian tanah 600 s/d 900 m dari permukaan laut.

Kalurahan Purwobinangun memiliki luas wilayah dengan jumlah keseluruhan 1.348.000 Ha. Ini meliputi tanah sawah, tanah pekarangan, tanah fasilitas umum dan tanah kas desa. Keseluruhan tanah yang ada di Kalurahan Purwobinangun merupakan tanah datar. Sebagian besar tanah di Kalurahan Purwobinangun berupa tanah sawah sedangkan tanah kering di manfaatkan untuk pekarangan dan bangunan. Kalurahan Purwobinangun merupakan daerah pertanian. Penduduk desa sangat bergantung dengan kehidupan pertanian untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk yang produktif sekarang ini, maka kehidupan dalam perekonomian juga akan meningkat.

B. Visi Misi Lurah

Rumusan visi Lurah Purwobinangun periode tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Purwobinangun Yang Lebih Sejahtera, Berbasis Semangat Kemandirian, Keadilan, dan Pembangunan Berkelanjutan”. Penjelasan atas Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut: *Tabel 2.6 (Terlampir)*

Misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi lurah pada periode 2021-2026 adalah melalui langkah-langkah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjaga masyarakat Purwobinangun yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang dilandasi dengan toleransi beragama;
2. Menciptakan tata kelola pemerintah yang baik yang berbasis pada akuntabilitas dan optimalisasi pelayanan masyarakat;
3. Menjaga dan mengembangkan seni, adat, budaya, dan potensi desa wisata dengan mengarusutamakan peran serta masyarakat;
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya pembangunan; dan
5. Mengoptimalkan kreatifitas dan inovasi dalam memasuki era industri 4.0.

Rumusan atas Misi tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut dalam penjelasan sebagai berikut: *Tabel 2.7 (Terlampir)*

A. Profil Kalurahan

a. Gambaran Demografi

a) Penduduk dan Keluarga

Kalurahan Purwobinangun memiliki 9.632 penduduk, dengan 4.785 pria dan 4.847 wanita. Uraian data tersebut terdapat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

**Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Akhir Tahun 2023
Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Jumlah Kepala Keluarga**

NO.	JENIS KELOMPOK	LAKI- LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	LAKI – LAKI	4785	49,68%	0	0,00%	4785	49,68%
2.	PEREMPUAN	0	0,00%	4847	50,32%	4847	50,32%
	JUMLAH	4785	49,68%	4847	50,32%	9632	100,00%
	BELUM MENGGISI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	TOTAL	4785	49,68%	4847	50,32%	9632	

Sumber: www.purwobinangun.slemankab.go.id

b) Penduduk Menurut Mata Pencaharian

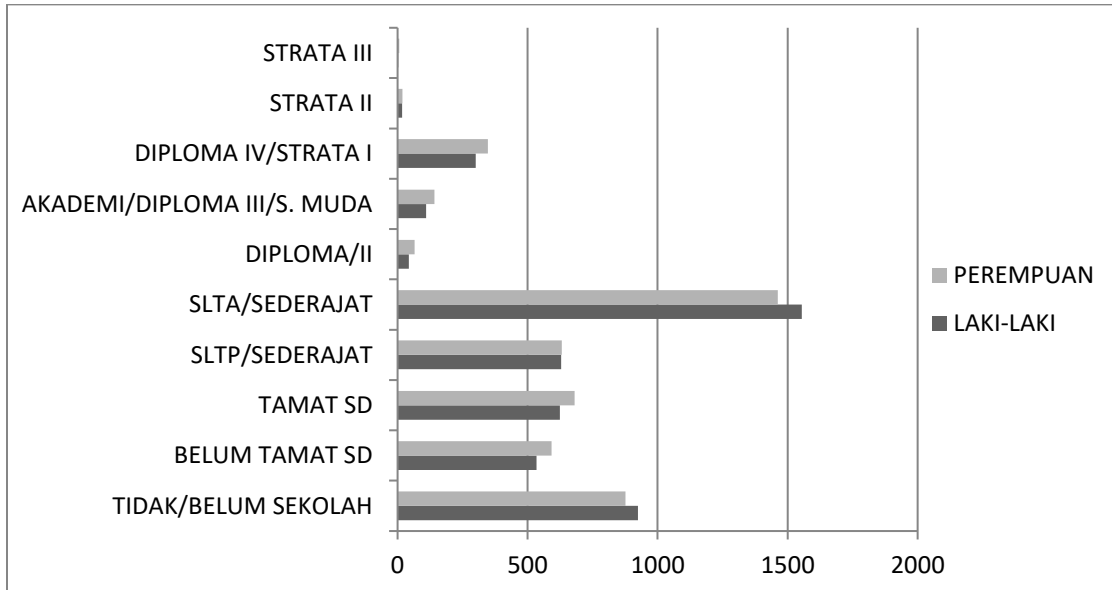
Penduduk Kalurahan Purwobinangun masih bergantung pada pekerjaan pertanian, perikanan, dan perkebunan. Pada akhir 2023, ada 1.283 pekerja disektor pertanian ini sekitar 13,32% dari jumlah penduduk yang terdata. Dikarena banyak orang yang bekerja di sektor pertanian menuliskan pekerjaan lain di dalam identitas kependudukannya, jumlah ini sebenarnya masih dapat meningkat.

c) Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk adalah indikator aksesibilitas masyarakat terhadap lapangan pekerjaan; lebih tinggi tingkat pendidikan, lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Pada tahun 2023, mayoritas penduduk Kalurahan

Purwobinangun adalah lulusan SLTA sederajat, termasuk lulusan SLTA yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Gambaran lengkap populasi berdasarkan latar belakang pendidikan disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Akhir Tahun 2023 Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Dalam KK



Sumber: www.purwobinangun.slemankab.go.id

b. Keadaan Sosial

a) Aksesibilitas Layanan Kesehatan

Salah satu komponen penting yang menentukan kesejahteraan sosial adalah aksesibilitas penduduk terhadap layanan kesehatan, termasuk tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Di Kalurahan Purwobinangun, ada Puskesmas Pembantu di Tawangrejo dan Gatep, Klinik Swasta di Jamblang, dan Dokter Pratek di Jamblang.

b) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Keamanan dan ketertiban masyarakat digambarkan dari masa lalu. Masyarakat sering mengalami konflik antara lain:

- 1) Konflik pertanahan: Sengketa warisan dan kepemilikan atau batas adalah masalah paling umum di bidang ini. Pihak yang bersengketa dapat berunding untuk menyelesaikan masalah ini.
 - 2) Konflik rumah tangga: Yang paling sering terjadi adalah perselingkuhan, pernikahan dini, hamil di luar nikah, dan perceraian. Terlepas dari dukungan musyawarah dan mediasi yang diberikan, masih ada konflik rumah tangga yang belum diselesaikan dan harus diputuskan di Pengadilan Agama.
 - 3) Pencurian: Pencurian adalah masalah yang umum dan mengganggu keamanan masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaksanaan kegiatan siskamling di masing-masing wilayah dapat membantu menyelesaikan masalah.
 - 4) Konflik tambang: Pertambangan adalah bidang yang sensitif dan dapat menyebabkan konflik jika pemanfaatannya menyebabkan kerugian terhadap kelompok masyarakat tertentu. Menjaga sumber daya air dan berseberangan dengan pertambangan rakyat dapat menimbulkan konflik sosial.
- c) Keluarga Pra Sejahtera

Data tahun 2022 menunjukkan bahwa 746 keluarga di Kalurahan Purwobinangun termasuk dalam Kategori Keluarga Miskin (KKM) dan 1885 Keluarga Rentan Miskin (KRM). Di seluruh padukuhan, persentase keluarga yang termasuk dalam kategori KKM dan KRM hampir sama. Padukuhan Ngepring memiliki jumlah penduduk terbanyak yang termasuk dalam KKM dan KRM.

c. **Aktivitas Ekonomi**

Beberapa elemen mendukung aktivitas ekonomi di Kalurahan Purwobinangun. Pertanian, termasuk perikanan dan peternakan, adalah sektor penggerak utama. Perdagangan dan barang juga mendorong kegiatan ekonomi, tetapi tidak banyak orang yang bekerja di bidang tersebut. Secara umum, ciri-ciri fisik wilayah Purwobinangun menunjukkan bahwa salak pondoh ditanam di lahan yang digunakan untuk pertanian. Namun, Purwobinangun juga menanam tanaman lain seperti padi, jagung, kacang tanah, ketela pohon, dan cabe. Sebagai akibat dari harga jual yang rendah, pertanian salak pondoh telah beralih ke pertanian lain. Banyak lahan yang dulunya ditanami Salak Pondoh sekarang dikembalikan ke sawah atau ditanami tanaman lain.

Masyarakat Purwobinangun banyak digerakkan oleh sektor pertanian. Aktivitas ini secara langsung berdampak pada pertumbuhan PDRB, lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan ketahanan pangan di Kabupaten Sleman. Selain itu, kegiatan ini secara tidak langsung berkontribusi pada pembentukan lingkungan yang mendukung pelaksanaan pembangunan serta pembentukan hubungan sinergis dengan subsektor dan sektor lain.

Padukuhan Karanggeneng, Kadilobo, dan Sembung adalah pusat perikanan Purwobinangun karena tanahnya landai. Minapadi juga telah dibuat dan diuji di daerah tengah Purwobinangun (Jamblangan, Watuadeg, dan Cepet) dengan potensi hasil yang cukup menjanjikan. Produk peternakan Purwobinangun meliputi sapi perah, sapi potong, kerbau, kambing, domba, bebek, itik, puyuh, ayam kampung, ayam potong, dan burung. Peternakan individu dan kelompok telah berkembang secara merata di hampir seluruh wilayah Kalurahan Purwobinangun.

Purwobinangun memiliki banyak potensi di bidang kehutanan. Dengan potensi kehutanan seluas 85 ha, wilayah ini didominasi oleh tanaman keras seperti kayu Sengon dan mahoni. Pertambangan rakyat menambang pasir dan batu kali di bagian utara Purwobinangun, termasuk Kemiri, Ngepring, dan Turgo, yang dilakukan di bantaran Sungai Boyong, dengan luas sekitar 20 ha.

Di Purwobinangun, ada tiga pusat perdagangan: perempatan Ngepring, pertigaan Candi, dan pertigaan Pulowatu. Dibutuhkan titik pertumbuhan baru agar bisnis jasa dan perdagangan dapat menyebar di seluruh Kalurahan Purwobinangun. Tingkat pertumbuhan ini dapat dikolaborasikan dengan pertumbuhan sektor pariwisata.

Wisata adalah salah satu sektor yang memiliki potensi yang cukup besar untuk berkembang. Semua wilayah di Kalurahan Purwobinangun memiliki potensi wisata yang dapat dieksplorasi, dan jika dikembangkan dan dikelola dengan lebih baik, hal itu dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Namun, selain fasilitas fisik, pembangunan infrastruktur wisata membutuhkan keahlian pengelola dan budaya masyarakat.

d. Kelompok Tani

Karena lokasinya di dataran tinggi, wilayah Purwobinangun memiliki ciri fisik yang cocok untuk pertanian salak pondoh. Suhu yang dingin di daerah ini sangat baik untuk pertanian salak pondoh. Namun saat ini dikarenakan harga jual dari salak tersebut yang relatif rendah sehingga banyak petani salak yang mencoba beralih ke pertanian lain. Pada saat ini di Kalurahan Purwoninangun yang masih bertahan untuk bertani salak berdasarkan data UPTD BP4 V Pakem Sleman, terdapat pada tabel 2.9, 2.10, dan 2.11
(Terlampir)

B. Kebijakan Pendapatan

Pengelolaan pendapatan kalurahan berarti mencari lebih banyak pendapatan sambil tetap mencari lebih banyak lagi. Semua uang yang diterima melalui rekening kalurahan merupakan hak kalurahan selama satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh desa atau dimasukkan ke dalam pendapatan desa. Anggaran pemerintah kota terdiri dari tiga (tiga) bagian pendapatan, yaitu pendapatan asli kota, pendapatan transfer, dan pendapatan tambahan.

a. Pendapatan Asli Kalurahan

Diharapkan bahwa Pendapatan Asli Kalurahan (PAK) akan berperan sebagai penggerak utama bagi pemerintah kalurahan dalam hal operasi pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Semakin tinggi PAK, semakin sedikit ketergantungan pemerintah kalurahan pada dana transfer ke kalurahan.

Tabel 2.3 Besaran Target dan Realisasi Pendapatan Asli Kalurahan Kalurahan Purwobinangun Tahun 2015-2022

No	Tahun	Target	Realisasi	Prosentase
1	2015	108.187.500,00	110.138.802,00	102%
2	2016	123.587.500,00	81.457.452,00	66%
3	2017	127.087.500,00	82.110.271,00	65%
4	2018	126.587.500,00	86.281.147,00	68%
5	2019	126.587.500,00	123.624.000,00	98%
6	2020	137.273.500,00	71.911.200,00	52%
7	2021	147.273.500,00	118.372.000,00	80%
8	2022	130.656.500,00	180.101.000,00	138%

Sumber : Realisasi APBKal Tahun 2015-2022, www.purwobinangun.slemankab.go.id

Sudah jelas bahwa dana transfer akan diberikan sesuai dengan peraturan dan arahan penggunaan. Perencanaan yang sudah disepakati sebelumnya dapat terhambat jika

tergantung pada dana transfer. Pemerintah kalurahan Purwobinangun sangat menyadari masalah ketergantungan kalurahan terhadap dana transfer ini pada. Karena Anggaran yang telah direncanakan sebelumnya untuk kegiatan telah dialihkan ke kegiatan yang menjadi prioritas utama pemberi dana, sehingga prioritas yang telah disepakati dalam dokumen perencanaan tahun ini tidak dapat dicapai. Akibatnya, dana desa yang seharusnya digunakan untuk kegiatan pembangunan dialihkan ke kegiatan yang menjadi prioritas utama pemerintah pusat.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAK), pemerintah Kalurahan Purwobinangun dapat melakukan hal-hal berikut:

- 1) Untuk mengidentifikasi dan meningkatkan peluang sumber pendapatan asli kalurahan;
- 2) Meningkatkan ekspansi sumber-sumber tersebut melalui investasi;
- 3) Dan untuk memperkuat hubungan dan kolaborasi dengan pihak lain yang bekerja di bidang pendapatan kalurahan;
- 4) Menciptakan dan meningkatkan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) untuk meningkatkan kontribusi pendapatan asli kalurahan;
- 5) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pungutan atas aset yang dipergunakan oleh Kalurahan;
- 6) Meningkatkan kemampuan untuk mengelola aset dan dana kalurahan dengan lebih baik.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer ialah Dana transfer ke Kalurahan adalah alat utama untuk menerapkan desentralisasi dan kewenangan Kalurahan. Untuk memenuhi kebutuhan Kalurahan, dana transfer berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, provinsi, dan daerah. Sebagai berikut adalah jumlah dana yang diberikan kepada pemerintah kalurahan Purwobinangun:

- 1) Dana Desa (DD) adalah dana yang dialokasikan kepada desa dari anggaran pendapatan dan belanja negara, yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana ini digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pengembangan masyarakat.
- 2) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang dikurangi dari dana alokasi khusus dan dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten. Dana ini dimasukkan ke dalam anggaran kabupaten.
- 3) Untuk Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH): komponen dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada pemerintah kalurahan, termasuk tambahan untuk hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- 4) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) adalah bantuan yang diberikan kepada kalurahan yang berupa dana yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. BKK dapat berasal dari Pemerintah Kabupaten Sleman atau Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah daerah telah menetapkan aturan terperinci tentang bagaimana itu digunakan dan dikelola..

**Tabel 2.4 Besaran Dana Tranfer Yang Diterima
Kalurahan Purwobinangun Tahun 2018-2022**

No	Jenis Pendapatan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	DDS	1.001.690. 000	1.239.245.00 0	1.313.101.0 00	1.327.747.0 00	1.188.826.0 00,00
2	PBH	532.341.6 83	587.675.215	454.948.766	517.689.24 9	715.916.07 2,00
3	ADD	1.403.575. 000	1.513.716.48 0	1.374.830.6 79	1.361.300.4 53,8	1.300.909.7 35,37
4	PBP	0	0	0	112.790.50 0	175.000.00 0,00
5	PBK	485.000.0 00	963.716.000	397.645.950	220.000.00 0	578.000.00 0

Sumber : Realisasi APBKal Purwobinangun 2018-2022, www.purwobinangun.slemankab.go.id.

3. Pendapat Lain-Lain

Pendapatan tambahan dapat berasal dari banyak hal, seperti pendapatan tambahan yang sah, hibah dan sumbangan pihak ketiga, kerja sama antara Kalurahan dan pihak ketiga, bunga bank, dan pendapatan tambahan lainnya.

Bunga bank terus menjadi kontributor tahunan terbesar dari Pendapatan Lain-lain. Untuk meningkatkan pendapatan dari kolom ini, Pemerintah Kalurahan Purwobinangun dapat melakukan hal-hal berikut:

- 1) Meningkatkan akses ke *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dapat diakses oleh Kalurahan Purwobinangun;
- 2) Mengajak semua bisnis, baik publik maupun swasta, untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di Kalurahan Purwobinangun; dan
- 3) Meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pengelolaan aset kalurahan.

C. Kebijakan Belanja

Untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan kalurahan, belanja kalurahan digunakan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan startegis dapat dibiayai dan dilaksanakan. Biaya dialokasikan seefektif mungkin untuk menyelesaikan tanggung jawab Kalurahan.

Belanja kalurahan diklasifikasikan menurut bidang, subbidang, kegiatan, jenis, item, dan rincian item. Bidang termasuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan kebutuhan mendesak.

Belanja kalurahan diklasifikasikan berdasarkan jenis barang yang dibeli, yang terbagi menjadi empat kategori: yaitu:

- 1) Belanja pegawai: Belanja yang digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain yang sah, dan pembayaran jaminan sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan, serta tunjangan BPKal.
- 2) Belanja barang dan jasa: Belanja yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang dan jasa ini digunakan untuk:
 - a) Operasional pemerintah kalurahan;
 - b) Memeliharaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kalurahan;
 - c) Acara sosial, pertemuan, pelatihan, bimbingan teknis;
 - d) Kegiatan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - e) Penghargaan untuk Rukun Tetangga atau Rukun Warga; dan

- f) Memberikan barang kepada komunitas atau kelompok masyarakat.insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
- g) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- 3) Belanja modal, yang berarti membeli barang dengan nilai manfaat lebih dari dua belas bulan dan menambah aset.
- 4) Pengeluaran tak terduga, yang mencakup biaya untuk operasi di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal di Kalurahan yang bertujuan untuk memberikan respons darurat terhadap bencana alam, non alam, dan sosial.

Tabel 2.5 Perbandingan Realisasi Belanja Per Bidang Kewenangan Kalurahan Purwobinangun Tahun 2018-2022

No	BIDANG	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penyelenggaraan Pemerintahan	1.248.586.885	1.780.721.651	2.122.517.230,50	2.219.980.880	2.041.572.184,00
2	Pelaksanaan Pembangunan	1.686.157.973	1.730.308.630	1.003.849.550,00	1.662.195.460	963.891.030,00
3	Pembinaan Kemasyarakatan	238.095.640	426.542.748	103.657.020,00	69.574.060	264.370.600,00
4	Pemberdayaan Masyarakat	274.329.330	649.883.230	122.936.150,00	69.999.970	446.640.762,00
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	21.291.890	7.975.080	668.439.880,00	829.259.155	580.176.173,00

Sumber : Realisasi APBKal Tahun 2018-2022, www.purwobinangun.slemankab.go.id

Pola pengaturan belanja yang proporsional, efisien, dan efektif digunakan untuk mewujudkan kebijakan belanja Kalurahan Purwobinangun. Salah satu hal yang akan dilakukan adalah:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama anggaran Kalurahan. Program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung adalah fokus anggaran. Belanja kalurahan sedang berlangsung. Selain itu, perencanaan, penetapan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban anggaran akan dipercepat melalui proses ini.
- 2) Prioritas pembangunan dalam penggunaan anggaran: anggaran harus digunakan sesuai dengan prioritas yang telah disepakati dalam dokumen perencanaan dan sesuai dengan tujuan dan visi yang ingin dicapai.
- 3) Penggunaan indikatif anggaran harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kalurahan, tujuan, misi, dan arah kebijakan, serta prioritas kegiatan yang sesuai dengan wewenang Kalurahan.

Ada banyak rencana kegiatan yang telah disepakati oleh RPJMKal. Setiap padukuhan atau kelompok berusaha untuk memasukkan usulan mereka ke dalam dokumen perencanaan selama proses pengusulan sistem terbuka. Dalam situasi seperti ini, ada kemungkinan bahwa kegiatan yang telah disepakati dan tercantum dalam dokumen RPJMKal tidak dapat diselesaikan sepenuhnya karena keterbatasan dana, tenaga kerja, atau waktu. Oleh karena itu, diskusi tentang penyusunan RKP setiap tahun di Musyawarah Kalurahan tentang kegiatan mana yang paling penting dan rasional untuk diberi prioritas. Usulan yang telah ada tetapi belum terpenuhi dari tahun 2021–2026 akan dimasukkan dalam dokumen perencanaan untuk periode yang akan datang.

D. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Kalurahan mengacu pada pengeluaran yang harus dibayar kembali atau diterima kembali oleh pemerintah Kalurahan pada tahun anggaran yang bersangkutan atau tahun anggaran berikutnya.

Selama proses penyusunan anggaran, selalu ada kemungkinan adanya defisit atau surplus anggaran. Defisit anggaran terjadi ketika pendapatan kalurahan pada tahun berjalan lebih rendah daripada biaya tahunan. Pembiayaan dari Kalurahan digunakan untuk menutup anggaran yang kurang.

Pembiayaan diprioritaskan untuk pengeluaran yang bersifat wajib, seperti untuk membiayai kegiatan prioritas, penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan kebutuhan mendesak. Selanjutnya, prioritas diberikan kepada investasi seperti partisipasi dalam Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) yang berfokus pada keuntungan atau keuntungan, atau untuk meningkatkan layanan masyarakat.

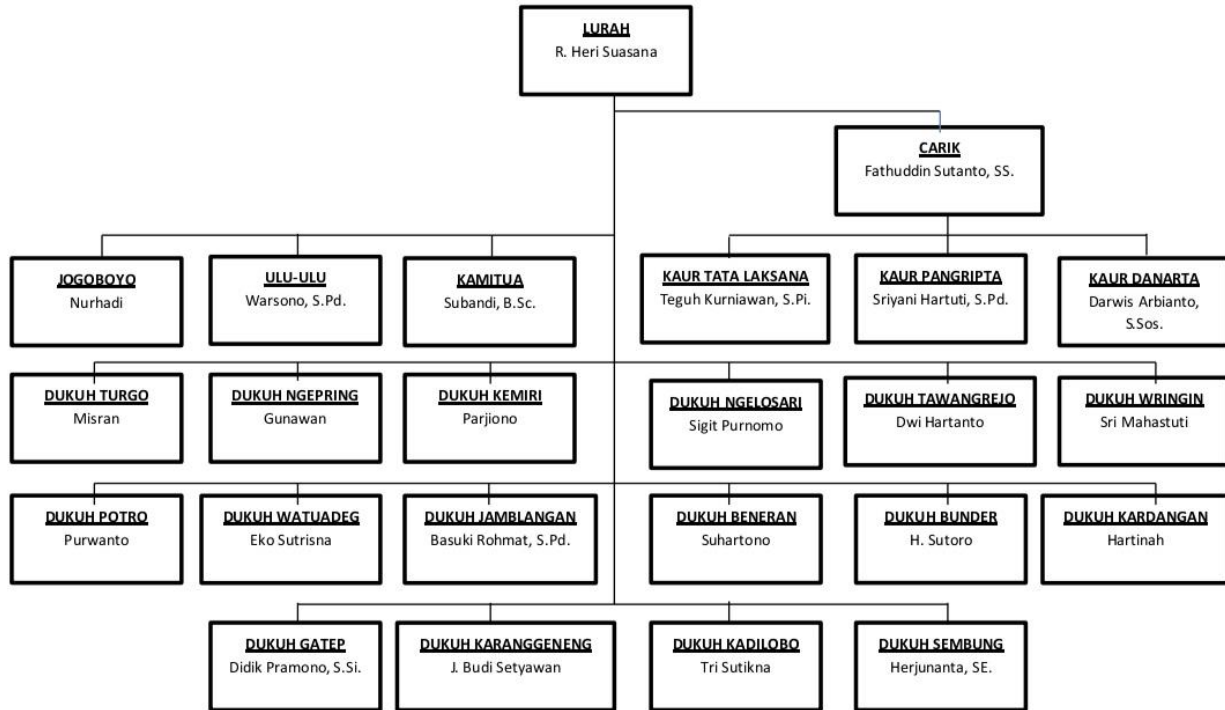
Secara umum, pembiayaan pemerintah daerah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :

- 1) Penerimaan pembiayaan: SiLPA dari tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan keuntungan dari penjualan aset terpisah (kecuali tanah dan bangunan).
- 2) Biaya pembiayaan: Pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal adalah komponen dari pengeluaran pembiayaan. Dalam satu tahun anggaran, dana cadangan untuk kegiatan tidak dapat diberikan secara bersamaan untuk Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal). Untuk meningkatkan pendapatan atau menyediakan pelayanan kepada masyarakat, kekayaan pemerintah kalurahan yang

diinvestasikan dalam BUMDes dianggarkan melalui penyertaan modal, yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Pemerintah Kalurahan

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN PURWOBINANGUN



Sumber: Struktur Pemerintahan Kalurahan Purwobinangun
<https://purwobinangunsid.slemankab.go.id/first/artikel/9> (Diakses 15 Juli 2023)

Setiap Kalurahan dipimpin oleh seorang lurah, yang bertanggung jawab atas semua kegiatan pemerintahan kalurahan. Lurah juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan pengendalian bencana dan situasi darurat.

Pemerintahan kalurahan terdiri dari tiga unsur secara organisasi: sekretariat, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan. Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan ketiga unsur

ini. Staf pamong kalurahan dapat membantu unsur sekretariat, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan dalam menjalankan tugasnya.

Sekretariat kalurahan dipimpin oleh Carik, yang bertanggung jawab membantu lurah dalam mengelola pemerintahan kalurahan. Keuangan, tata usaha dan urusan umum, serta perencanaan adalah tanggung jawab sekretariat kalurahan. Carik diberi bantuan oleh tiga (tiga) kepala urusan: Kaur Danarta, Kaur Tata Laksana, dan Kaur Pangripta.

Pelaksana teknis adalah pembantu lurah yang menangani urusan atau kegiatan tertentu yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat. Jogoboyo, Ulu-ulu, dan Kamituwa adalah tiga bagian dari pelaksanaan teknis. Bidang kewenangan Kalurahan mencakup pemerintahan, pembinaan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan bencana. Sekretariat dan pelaksana teknis berbeda dalam kegiatan yang dilakukan. Pelaksana teknis melakukan kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sedangkan sekretariat menangani urusan administratif.

Pelaksana kewilayahan, dalam hal ini dukuh, berfungsi sebagai pembantu lurah dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana di wilayah tugas mereka. Ruang lingkup tugasnya mirip dengan tugas seorang lurah, hanya saja tingkat padukuhannya lebih rendah. Pengampu kegiatan pelaksana teknis dan sekretariat mengawasi pelaksanaan tugas pelaksana kewilayahan.

F. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan RPJM Kalurahan

Menurut Peraturan Kalurahan Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, Permasalahan yang akan ditangani oleh Pemerintah Kalurahan Purwobinangun dari tahun 2021 hingga 2026 telah dievaluasi dan direncanakan. Musyawarah padukuhan digunakan untuk mendapatkan masalah ini.

- **Pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan**

1. Membangun dan atau merevitalisasi infrastruktur penunjang perekonomian masyarakat, seperti jalan lingkungan, jembatan, jalan pertanian, irigasi, dan drainase.
2. Membangun sistem administrasi induk kalurahan dengan membangun web kalurahan sebagai bagian dari penyebaran informasi pembangunan dan kependudukan.
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar yang mendukung kehidupan sosial-ekonomi.
4. BUMDes didirikan dan dikembangkan sebagai unit usaha kalurahan.
5. Menggunakan papan informasi yang akurat, akuntabel, dan berkelanjutan untuk meningkatkan penyampaian informasi tentang pembangunan kalurahan.
6. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk kalurahan tujuan wisata di wilayah utara Sleman.

- **Pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan usaha yang berdasarkan potensi lokal.

2. Memberikan dukungan bagi masyarakat melalui penyediaan kesempatan usaha, kewirausahaan, pelatihan dan pembinaan kewirausahaan, dan akses ke pemasaran.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kelompok usia produktif (remaja dan wanita).
4. Menyediakan masyarakat untuk kemajuan teknologi dan memfasilitasi akses internet gratis.

- **Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan sosial budaya masyarakat dan keadilan gender (perempuan, pemuda, anak).
2. Mewujudkan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan (dari sektor pertanian) melalui pemanfaatan inovasi zonasi dan teknologi tepat guna.
3. Meningkatkan produktivitas, menerapkan ekonomi hijau (organik), dan meningkatkan kegiatan ekonomi jalanan berbasis komoditas berkualitas tinggi (beras lokal, dll) dengan mengembangkan kawasan/lahan pendukung.
4. Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana serta pengolahan dan produksi.
5. Meningkatkan akses masyarakat daerah terhadap permodalan usaha, pemasaran dan informasi pasar.
6. Mengembangkan lembaga pendukung ekonomi jalanan yang terkait dengan usaha yang dikelola desa.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Wawancara dan Observasi peneliti menganalisis bahwa peran Pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan petani salak belum terlihat, dimana petani salak sendiri berusaha secara mandiri untuk mencari solusi dalam permasalahan mereka, Pemerintah Kalurahan hanya melihat pemberdayaan petani secara umum saja, sedangkan disini pemberdayaan tersebut tidak merata, seharusnya para petani salak diperhatikan secara khusus dalam pengembangannya, karena untuk saat ini para petani salak memiliki permasalahan besar dalam penyaluran dan pemasaran hasil produksi, dalam hal ini para petani salak membutuhkan peran Pemerintah Kalurahan melalui Otoritas dan Kebijakan dalam mencari solusi dari permasalahan mereka. Pemerintah Kalurahan hanya melakukan pemberdayaan petani salak dalam meningkatkan Produktivitasnya namun tidak dengan pendapatannya, Pemerintah Kalurahan hanya memberikan Pendampingan Penyuluhan dan Pelatihan untuk meningkatkan Produktivitas. Namun belum menemukan solusi dalam Penyaluran dan Pemasaran hasil produksi. Sehingga saat ini para petani berhadapan mereka dapat bekerjasama dengan pemerintah kalurahan untuk dapat mencari solusi dari permasalahan yang mereka alami saat ini.

Kemudian relasi pemerintah kalurahan dengan petani salak, dan masyarakat dalam pemberdayaan petani salak memang belum terlihat sepenuhnya hubungan pemerintah kalurahan dengan Gapoktan hanya sebagai fasilitator dan bermitra dalam pengembangan usaha namun dalam pemberdayaan petani terutama petani salak belum terlihat, Gapoktan sendiri belum dapat merangkul petani salak dengan baik dimana petani salak merasa gapoktan tidak mampu memberikan solusi atas permasalahan yang mereka alami. Hubungan pemerintah kalurahan

dengan petani salak juga tidak terlihat dimana pemerintah kalurahan kurang responsif terhadap permasalahan yang dialami para petani salak, pemerintah kaluarahan hanya menjalankan program pemberdayaan petani secara umum saja seperti penyuluhan, prasarana jalan, irigasi air bersih sedangkan petani salak sendiri memiliki permasalahan yang lebih krusial dalam hal penyaluran hasil produksi dan pemasarannya.

Terkait interaksi pemerintah kalurahan dengan petani salak, dan masyarakat dalam pemberdayaan petani salak juga terlihat hanya Formalitas saja belum ada interaksi secara khusus yang memang bertujuan untuk perkembangan pemberdayaan, pemerintah kalurahan dan Gapoktan terikat kerjasama dalam pengembangan usaha. Gapoktan sebagai wadah para petani salak dalam meningkatkan produktifitasnya namun tidak dalam pendapatannya melalui program pendampingan penyulihan dan pelatihan yang di berikan gapoktan untuk para petani salak cukup efektif dalam perkembangan produktifitas namun yang menjadi permasalahan krusial adalah penyaluran hasil produksi dan pemasarannya. Karena permasalahan inilah para petani meminta bantuan dari pemerintah kalurahan, namun memang belum ada respon khusus dari pemerintah kalurahan, padahal para petani salak sudah melakukan pendekatan khusus dengan pemerintah kalurahan melalui meminta keikutsertaan wakil pemerintah kalurahan untuk hadir dalam setiap kegiatan yang di lakukan kelompok tani. Sehingga saat ini para petani berhadap mereka dapat bekerjasama dengan pemerintah kalurahan untuk dapat mencari solusi dari permasalahan yang mereka alami saat ini.

B. SARAN

Setelah pembahasan beberapa bab diatas, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan petani Sarak untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan teknologi dan memberikan pelatihan kepada petani Salak untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mendistribusikan dan memasarkan hasil pertanian.
2. Memudahkan masyarakat dalam hal sarana produksi dan pengembangan agribisnis. Fasilitas seperti informasi pasar, perluasan akses pasar, permodalan dan pengembangan kerjasama dengan badan usaha lain semuanya diperlukan serta Merevitalisasi kelompok tani masyarakat. Dengan berbagai fasilitas yang dibutuhkan petani, diharapkan selain bercocok tanam dengan baik, para petani juga terjamin bisa menjual hasil panennya dengan harga yang menguntungkan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong mereka untuk mengembangkan usaha pertaniannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL, SKRIPSI dan THESIS

- Anwar, Khairul,. Meyzi H.(2017). Politik Pemberdayaan Petani Di Desa Rambah Muda, Riau. Jurnal Ilmu Pemerintahan. 2(2):103-118
- Batubara, Alwi Hasyim.(2006). Konsep Good Governance Dalam Konsep Otonomi Daerah. Jurnal Analisis Administrasi Dan Kebijakan. 3(1).
- Darmansyah, Muhammad Y.B., Ahsan S.(2014). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kakao Di Desa Kayuangin Kapanewon Malunda Kabupaten Majene. Jurnal Ilmu Pemerintahan. IV(1).
- Hamid, Hendrawati.(2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di Kapanewon Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Ejournal.Ymbz.Or.Id.1(3).
- Hastuti, Sri.(2013). Strategi Pengembangan Salak Pondoh Pronojiwo Kabupaten Lumajang. Jurnal Ilmiah Inovasi. 13(3):233-240.
- Laily, S.F.R., Heru R, Farida N.(2014).Pemberdayaan Petani DalamMeningkatkanKetahanan Pangan (Studi Di Desa Betet, Kapanewon Ngronggot,Kabupaten Nganjuk). Jurnal Administrasi Publik. 2(1):147-153.
- Mangowal, Jack.(2013). Pemberdayaan Masyarakat Petani Dalam Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Pedesaan Di Desa Tumani Kapanewon Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Governance. 5(1).
- Nippi, Andi T., Andi P. M.(2019). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani(Studi Kasus Di Desa Siawung Kapanewon Barru Kabupaten Barru). Meraja Journal.2(1).
- Nurul HA.(2020). Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Bontomarannu Kabupaten Gowa (Skripsi). Makasar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Wahyuni, Dinar.(2017). Penguatan Kelembagaan Petani Menuju Kesejahteraan Petani. Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial. IX(17).

BUKU

Bungin, Burhan. (2005). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana.

Daniel, Moechar. 2002. Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta: Pt. Buni Aksara Ambar Teguh

Fahrudin, Adi. (2012). Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: Pt. Refika Aditama.

Faisal, Sanapiah (2005). Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Onny. S. Prijono Dan A.M.W. Pranarka. (1996). Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, Dan Implementasinya. Jakarta: Csis

Prasetyo, Bambang Dan Mifatahul Jannah, Lina. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta. Rajawali Pers

Sudjana. (2001). Pendidikan Luar Sekolah. Bandung: Falah Production

Suharto, Edi. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung : Pt. Refika.Aditama.

Sulistiyani. (2004). Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan, Yogyakarta: Gava Media

Sunyoto Usman. (2010). Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suparjan & Hempri S. (2003). Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan. Yogyakarta: Aditya Media.

Totok Dan Poerwoko. (2012). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik.Bandung: Alfabeta.

Zubaedi. (2013). Pengembangan Masyarakat Wacana Dan Praktik. Jakarta: Kencana.

UNDANG-UNDANG dan PERATURAN

PERATURAN KALURAHAN PURWOBINANGUN NOMOR 2 TAHUN 2023 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (Rkp-Kalurahan) Tahun Anggaran 2024

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013 Tentang
Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 Tentang Desa

SITUS WEBSITE

<https://purwobinangunsid.slemankab.go.id/first>

https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/168-pertanian

<https://data.slemankab.go.id/data/organization/dinas-pertanian-pangan-dan-perikanan>

LAMPIRAN

Tabel 2.6 Penjelasan Visi

No.	Kalimat/Frasa	Penjelasan
1.	“Terwujudnya”	Artinya: dapat terjadi. Menunjukkan keadaan ideal yang diharapkan akan terjadi;
2.	“Purwobinangun”	<p>Bisa berarti penduduk, komunitas, atau wilayahnya. Penduduk artinya: orang atau orang yang tinggal di suatu tempat (kampung, negeri, pulau, dan sebagainya) (KBBI). Wilayah artinya: daerah (kekuasaan, pemerintahan, pengawasan, dan sebagainya); lingkungan daerah (provinsi, kabupaten, Kapanewon) (KBBI).</p> <p>Untuk mencapai kondisi ideal, masyarakat dan penduduk akan bekerja sama. Stakeholder yang konsisten dalam persepsi, sikap, dan perilaku (komitmen) dalam setiap langkah menuju cita-cita yang diinginkan</p> <p>Istilah "wilayah" mengacu pada area yang dipisahkan oleh batas yang membedakannya dari wilayah lain.</p>
3.	“Lebih Sejahtera”	<p>lebih selamat, aman, dan makmur. "Lebih Sejahtera" (KBBI) merujuk pada kondisi yang lebih baik, yang telah melewati kondisi saat ini.</p> <p>"Sejahtera" adalah istilah yang mengacu pada suatu keadaan di mana populasinya menikmati kesejahteraan, kesehatan, dan keamanan.</p>
4.	“Kemandirian”	Hal atau keadaan dapat berdiri sendiri (KBBI) merujuk pada keadaan di mana masyarakat Purwobinangun mampu menjadi subjek pembangunan, mampu

		mengidentifikasi dan memanfaatkan potensinya, dan mampu memanfaatkan kekuatan dan peluang yang mereka miliki.
5.	“Keadilan”	Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan keadilan sebagai sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. merujuk pada keadaan di mana setiap anggota masyarakat adalah bagian dari proses pembangunan dan memiliki hak dan kewajiban yang sama, dengan peran yang sesuai dengan kemampuan mereka. Selain itu, ini tidak berarti "emban cinde emban siladan", tetapi kondisi yang tidak membedakan satu sama lain. Adil tidak berarti harus identik, tetapi menunjukkan bahwa setiap orang menerima sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan tingkat kemampuan mereka.
6.	“Berkelanjutan”	Berkelanjutan artinya berarti terus-menerus, konsisten (KBBI). merujuk pada situasi di mana hasil masa lalu disimpan, dirawat, dilestarikan, dan dikembangkan untuk meningkatkan manfaat.

Sumber : Peraturan Kalurahan Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2021 Tentang RPJM Kalurahan Tahun 2021-2026. www.purwobinangun.slemankab.go.id

Tabel 2.7 Penjelasan Misi

No.	Misi
1.	<p>Menjaga Masyarakat Purwobinangun Yang Memiliki Nilai-Nilai Agama Yang Dilandasi Dengan Toleransi Beragama;</p> <p>Penjelasan: Negara Kesatuan Republik Indonesia mempertahankan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang berlaku sebagai negara demokrasi yang berbasis Pancasila. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Masyarakat Kalurahan Purwobinangun telah menunjukkan sikap religiusitas, rukun, saling menghargai, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan kehidupan mereka berdasarkan agama, moral, dan etika. Selama bertahun-tahun, prinsip agama telah digunakan untuk mendorong kebersamaan dan toleransi. Sangat penting untuk selalu menjaga keadaan yang baik.</p>
2.	<p>Menciptakan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Yang Berbasis Pada Akuntabilitas Dan Optimalisasi Pelayanan Masyarakat;</p> <p>Penjelasan : Semua Semua lembaga pemerintah, termasuk pemerintahan Kalurahan, harus memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan efisien. Ini dicapai dengan meningkatkan kualitas birokrasi sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal diharapkan dapat membantu aparatur pemerintah memberikan pelayanan secara optimal.</p>
3.	<p>Menjaga Dan Mengembangkan Seni, Adat, Budaya, Dan Potensi Desa Wisata Dengan Mengarusutamakan Peran Serta Masyarakat;</p> <p>Penjelasan :</p> <p style="padding-left: 40px;">Kebudayaan adalah produk dari kreativitas, rasa, dan karsa manusia. Kebudayaan memainkan peran penting dalam proses globalisasi sebagai identitas bangsa. Karena arus informasi dan teknologi informasi mudah diakses, perubahan berkembang dengan cepat. Oleh karena itu, semua pihak yang bertanggung jawab di Kalurahan Purwobinangun harus bekerja sama untuk menjaga, melestarikan, memajukan, dan mengembangkan kebudayaan, dan menggunakannya sebagai modal untuk pembangunan masa depan.</p> <p style="padding-left: 40px;">Diharapkan pelestarian kebudayaan dapat meningkatkan kesadaran, kepedulian,</p>

	<p>dan komitmen terhadap pentingnya pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup bersama. Selain itu, mereka harus memahami bahwa pembangunan adalah usaha kolektif yang menuntut partisipasi semua pihak, bukan hanya pemerintah.</p>
4.	<p>Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dengan Mengoptimalkan Potensi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Dan Sumber Daya Pembangunan;</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Ekonomi kerakyatan yang bergantung pada kekuatan lokal membutuhkan dukungan terus menerus. Diharapkan pemeliharaan, peningkatan, pemanfaatan, investasi, dan pengelolaan sarana ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, budaya, dan olahraga akan mendorong dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.</p> <p>Selain itu, diharapkan keuntungan akan meningkat jika sumber daya manusia, alam, dan pembangunan dioptimalkan. Penyusunan rencana wilayah dan ruang, pemanfaatan jejaring ekonomi, dan pembentukan pusat dan titik tumbuh diharapkan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.</p>
5.	<p>Mengoptimalkan Kreatifitas Dan Inovasi Dalam Memasuki Era Industri 4.0.</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Sangat penting untuk menjawab perkembangan dunia digital saat ini. Untuk menanggapi kemajuan teknologi informasi dalam birokrasi pemerintahan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi layanan, dan secara bertahap dan berkelanjutan mengintegrasikan dan mengupgrade sarana teknologi informasi harus dilakukan.</p> <p>Selain itu, teknologi informasi harus dilihat oleh masyarakat sebagai peluang baru yang membutuhkan peningkatan kreatifitas dan inovasi untuk meningkatkan taraf hidup. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.</p>

Sumber : Peraturan Kalurahan Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2021 Tentang RPJM Kalurahan Tahun 2021-2026, www.purwobinangun.slemankab.go.id

Tabel 2.8 Kelompok Tani Wringin Mulyo

Kapanewon : PAKEM			
Desa/Kalurahan : PURWOBINANGUN			
Kelompok Tani : Wringin Mulyo			
Subsektor : HORTIKULTURA			
Komoditas : SALAK			
1	SABARINTO	31	SRIYANA
2	RAJIYONO	32	HERU JITO
3	SUKAMTO	33	SISWANTO
4	SUWARNI	34	AGUS INDARTO
5	SUWARTI	35	CARDIYANTO
6	TONY	36	LARDIYANTO
7	PARYOTO	37	ARFIAN HENDRIATMOJO
8	PARJONO	38	Ant.MARSUDI
9	MARGONO	39	WARJINO
10	SUBANDI	40	WIYADI
11	SUYITMAN	41	TEGUH PUJIRAHARJO
12	SUPRAHONO	42	DARYONO
13	MUSKAM	43	PRIYANTO
14	BUDI KUSWANTO	44	WARINDI
15	SUTRISNA	45	MUJIYANA
16	BASUKI RAHMAD	46	FX.WAGIMIN
17	SUHERI	47	Ig.TUGIMAN
18	EKO PURWANTO	48	SUMARNO
19	IRWANTORO	49	SUDI UTOMO
20	BAMBANG SUKOWIYONO	50	HARJO SUMARYO
21	SUGIYANTO	51	REJO UTOMO
22	IMAM PRAMONO	52	Y.NGADIMIN
23	MUJI WIYONO	53	SRI RAHAYU
24	DASMIN	54	C.SUHARSILAH
25	JADI RIYANTO	55	MA.SUMINEM
26	MUH.ZAENI	56	SRI SUMIYATI
27	SURANDI	57	PAWIRO SUWARNO NY
28	AGUS BUDIYONO	58	RIYANTO
29	ADDUL SALAMA		
30	DAMURI		

Sumber: UPTD BP4 V Pakem Sleman 2023

Tabel 2.9 Kelompok Tani Mekar Lestari

Kapanewon : PAKEM			
Desa/Kalurahan : PURWOBINANGUN			
Kelompok Tani : Mekar Lestari			
Subsektor : HORTIKULTURA			
Komoditas : SALAK			
1	HS.SUDIYONO	31	YP.SUGIYONO
2	FL.SUHARNO	32	MARJONO
3	SARNO KADIWIYONO	33	JASMANTO
4	DJASMANTO	34	SUKARSIH
5	SUMARDI	35	TRI PARDIYATI
6	MUJI SUHARNO	36	ETIK SUMARJIYAH
7	MARYONO MARJO	37	TUKINEM
8	MISIDI	38	HARIYATI
9	FX.WINARTO	39	MERSINEM
10	ANDREAS SUYATNO	40	KASIRAH
11	RIYONO	41	HARYATI
12	RIYONO	42	AGNES PARJIYAT
13	GUNARJO	43	TUKIRAH
14	MARIDI	44	PARIYEM
15	MUJIMIN	45	TRI HARYATI
16	DASIRAN	46	NGADINAH
17	SARDI	47	SUGINI
18	DASIMIN	48	MUJI HARTOMO
19	M. SUYADI	49	MUSIYEM
20	EDI SUDARMAJI	50	SRI HARYANTI
21	M.SUYADI	51	TUGINEM
22	PETRUS SUNARTO	52	MUSINEM ADI WIYONO
23	YULIANTO	53	AMINAH
24	FX.SUMARDI	54	MARDI SUTRISNO
25	SARIJO		
26	SUKRIS		
27	RAMIDI		
28	PAIDI		
29	BERNADUS SUGIYONO		
30	POINGUN		

Sumber: UPTD BP4 V Pakem Sleman 2023

Tabel 2.10 Kelompok Tani Kumpul Makmur

Kapanewon : PAKEM			
Desa/Kalurahan : PURWOBINANGUN			
Kelompok Tani : Kumpul Makmur			
Subsektor : HORTIKULTURA			
Komoditas : SALAK			
1	MUJIYANTO	47	YUSUF PRIHANTORO
2	HERI WIDIANANTO	48	WARJIYANTO
3	FAUZI	49	SUROSO
4	H.SUHARNO	50	AGUS KRISTIYANTO
5	WIDODO	51	DIDIK SUTJIANTO
6	TONO HARTONO	52	IMAM HANAFI
7	AL.SUWIGNYO	53	KARMANTO
8	SUPRAPTO	54	MARSUDI
9	JOKO SUWONDO	55	SUKISMANTO
10	SUBARDI	56	SUGIYANTO
11	JUMAR	57	SAIDO
12	BASUKI ROCHMAD	58	FAUDIN SUTANTO
13	EKO TRI WIDARYANTO	59	TASWIN JN
14	ILYAS KARNO	60	GUNAWAN ARIANTOPO
15	H.TUKIMIN	61	ASHADI SAMSUL
16	MURBIYANTO	62	ISNANTO
17	WIDI UTOMO	63	JULY PRASETYO
18	BUDIJONO	64	SUPRIHATIN
19	SUNARTO	65	SURYADI
20	BARDIYONO	66	YATNO SUMARTO
21	TRI HARYONO	67	BURHAN KAMALUDIN
22	SUPARJO	68	SAMSUL BAHRI
23	DALYONO	69	TUTUT KUSBIYANTO
24	TOHARI	70	MUHAJIR
25	MARYONO	71	AZIS JUWANDI
26	SUNARYO	72	KARIYONO
27	H.SUDARTO.SPD	73	WIDIATMOKO
28	PB.SUDIYONO	74	H.MARLAMTO
29	DRS.JULIANTO.MSI	75	MUH. FARID WISNU AJI
30	PAIDO	76	YULI PURWANTO
31	ENWIN IHSANUDIN	77	INOKI AZMI.P
32	KARTIJO	78	SUPARDI
33	YOSEPH SUPARDI	79	PARJO
34	MARYADI	80	YULI PURNOMO
35	RUSTAMADI	81	YASIR AROFAT
36	SUYADI	82	LUKAS SUWANDI
37	CHAMELIUS JOKO SUMPONO	83	SUNARJO
38	SUNARNO	84	NUR HIDAYATI S.AG

39	ROKIP PURNOMO	85	UMI KAYATUN
40	YUDI ISWATORO	86	PARINAH
41	SUDARYANTO	87	SRI PURWANTI
42	ARIS PRABOWO	88	DRA. SRI PURWANINGSIH
43	MIDI JOKO TRIYONO.SE	89	SRIYANTI
44	AGUS MURWANTO	90	ETIK WIDARYATI
45	Y.HARDI SUSANTO	91	B.SUKARTINAH
46	MARYOTO	92	SRI ASTUTI

Sumber: UPTD BP4 V Pakem Sleman 2023

PEDOMAN WAWANCARA

Hari / Tanggal :
Nama Lengkap :
Usia :
Pendidikan Terakhir :
Jabatan/Posisi :

PERTANYAAN	
Relasi Pemerintah Kalurahan Dengan Pihak Pihak Yang Terkait Dalam Pemberdayaan Petani Salak	
1.	Bagaimana Hubungan Pemerintah Kalurahan Dengan Para Petani Salak?
2.	Bagaimana Hubungan Pemerintah Kalurahan, Petani Salak, Dan Stakeholder Terkait Dalam Pemberdayaan Petani Salak?
3.	Apa Saja Hak Dan Kewajiban Pemerintah Kalurahan Dalam Pemberdayaan Petani Salak?
4.	Apakah Pemerintah Kalurahan Responibilitas Terhadap Permasalahan Dalam Pemberdayaan Petani Salak?
5.	Permasalahan Apa Saja Yang Menjadi Penghambat Dalam Pemberdayaan Petani Salak?
6.	Siapakah Yang Memiliki Peran Penting Dalam Pemberdayaan Petani Salak?
7.	Strategi Apa Yang Dilakukan Pemerintah Kalurahan Untuk Pemberdayaan Petani Salak?
8.	Selain Pemerintah Kalurahan Dan Petani Salak, Siapa Saja Pihak Pihak Yang Terkait Dalam Pemberdayaan Petani Salak?
9.	Sejauh Mana Pemerintah Kalurahan Berperan Dalam Pemberdayaan Petani Salak?

10.	Bagaimana Kewenangan Pemerintah Kalurahan Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Petani Salak?
Interaksi Pemerintah Kalurahan Dengan Pihak Pihak Yang Terkait Dalam Pemberdayaan Petani Salak.	
11.	Bagaimana Upaya Pemerintah Kalurahan Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Petani Salak?
12.	Apakah Ada Kebijakan Yang Dibuat Pemerintah Kalurahan Untuk Pemberdayaan Petani Salak?
13.	Apa Saja Program Yang Sudah Dilakukan Pemerintah Kalurahan Untuk Pemberdayaan Petani Salak?
14.	Bagaimana Pemerintah Kalurahan Mencari Solusi Untuk Permasalahan Yang Menjadi Penghambat Dalam Pemberdayaan Petani Salak?
15.	Dimasa Depan Kebijakan Atau Program Apa Yang Akan Dilakukan Pemerintah Kalurahan Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Petani Salak?
16.	Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kalurahan Dalam Meningkatkan Kapasitas Petani Salak?
17.	Faktor Apa Saja Yang Menjadi Pendukung Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Petani Salak?
18.	Bagaimana Kinerja Pemerintah Kalurahan Dalam Menjalankan Otoritas Pemberdayaan Petani Salak?
19.	Apakah Program Yang Dijalankan Pemerintah Kalurahan Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Kepentingan Petani Salak?
20.	Apakah Dalam Penyusunan Program Pemberdayaan Pemerintah Kalurahan Ada Partisipai Dari Petani Salak?

DOKUMENTASI



PAK YUDI, KAMITUA
PURWOBINANGUN



PAK PUR, PERANGKAT KALURAHAN
PURWOBINANGUN



PAK SIGIT, DUKUH NGELOSARI
KELOMPOK TANI NGELOSARI
PURWOBINANGUN



PAK BUDIMAN, PPL UPT BP4 PAKEM
PURWOBINANGUN



PAK PARJIONO, KETUA KELOMPOK
TANI KEMIRI PURWOBINANGUN



PAK AGUS PRIYANTA, BPKAL POKJA
PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



IBU RINI, KWT UMKM
PURWOBINANGUN



IBU YATMI, ANGGOTA KELOMPOK
TANI PURWOBINANGUN



IBU RAMTIANA, KWT UMKM
OLAHAN SALAK



IBU YULI, ANGGOTA KELOMPOK
TANI PURWOBINANGUN

SURAT IJIN PENELITIAN DARI KALURAHAN PURWOBINANGUN



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON PAKEM
PEMERINTAH KALURAHAN PURWOBINANGUN
ꦥꦺꦩꦸꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦏꦺꦩ꧀ꦥꦺꦩꦸꦠꦺꦤ꧀ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦸꦫꦮꦺꦤꦁꦸꦤ꧀
Alamat : Jl. Pakem-Turi Km.04 Watuadeg Purwobinangun Pakem Sleman Yogyakarta 55582
Laman : www.purwobinangun.slemankab.go.id Surel : purwobinangun@slemankab.go.id

SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN

Nomor : 070/102/X/2023

Pemerintah Kalurahan Purwobinangun dengan ini memberikan izin kepada:

1. Nama : Sedy Elvyna Insani
 2. NIM : 18520117
 3. Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 4. Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Deas "APMD"
 5. Judul Penelitian : Ijin Penelitian dan Survey berjudul :
" Pemberdayaan Petani Salak di Kalurahan
Purwobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten dalam
Perspektif Governance "
 6. Tempat : Padukuhan Ngelosari, dan Padukuhan Kemiri Kalurahan
Purwobinangun
- Dosen Pembimbing : Drs. B. Hari Saptaning Tyas M.Si
- Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwobinangun, 23 Oktober 2023



Tembusan :

1. Sdr. Sedy Elvyna Insani
2. Dukuh Kemiri
3. Dukuh Ngelosari
4. Arsip